



RENCANA STRATEGIS

(RENSTRA)

*Perangkat Daerah
Tahun 2025 - 2029*





BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 48 TAHUN 2025

TENTANG
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan untuk mewujudkan sinergitas pelaksanaan pembangunan, perlu perencanaan pembangunan daerah dalam satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional yang disusun secara berjenjang oleh Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah;
- b. bahwa untuk mewujudkan satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional, perlu menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah yang memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan, dan subkegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 273 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah setelah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ditetapkan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 122 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bantul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7059);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disebut RPJMD Tahun 2025-2029 adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
2. Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
3. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Bupati adalah Bupati Bantul.
7. Daerah adalah Kabupaten Bantul.

Pasal 2

- (1) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, kegiatan, dan subkegiatan pembangunan dalam pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
- (2) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan berpedoman pada RPJMD Tahun 2025-2029.
- (3) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Renja Perangkat Daerah tahun 2026 sampai dengan tahun 2030.

Pasal 3

- (1) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 disusun dengan sistematika:
BAB I : PENDAHULUAN
BAB II : GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
BAB III : TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN
BAB IV : PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
BAB V : PENUTUP
- (2) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul

pada tanggal 19 September 2025

BUPATI BANTUL,



ABDUL HALIM MUSLIH

Diundangkan di Bantul

pada tanggal 19 September 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,



AGUS BUDIRAHARJA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025 NOMOR 51

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 48 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT
DAERAH TAHUN 2025-2029

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2025-2029

DAFTAR ISI

1. Sekretariat Daerah	1
2. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.....	105
3. Inspektorat Daerah.....	160
4. Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga.....	224
5. Dinas Kesehatan	303
6. Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Dan Kawasan Pemukiman	522
7. Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	696
8. Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	767
9. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan.....	845
10. Dinas Sosial	1030
11. Dinas Pertanahan Dan Tata Ruang	1163
12. Dinas Kebudayaan	1236
13. Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi.....	1297
14. Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian	1364
15. Dinas Lingkungan Hidup.....	1452
16. Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	1562
17. Dinas Perhubungan.....	1635
18. Dinas Komunikasi Dan Informatika.....	1716
19. Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	1825
20. Dinas Pariwisata.....	1886
21. Satuan Polisi Pamong Praja	1963
22. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Kalurahan.....	2016
23. Dinas Kelautan Dan Perikanan	2074
24. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.....	2149
25. Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	2223
26. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia	2281
27. Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2351
28. Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	2423
29. Kapanewon Srandakan.....	2463
30. Kapanewon Sanden	2530
31. Kapanewon Kretek.....	2593
32. Kapanewon Pundong	2658
33. Kapanewon Bambanglipuro	2728
34. Kapanewon Pandak	2784
35. Kapanewon Pajangan	2842
36. Kapanewon Bantul	2913
37. Kapanewon Jetis	2981
38. Kapanewon Imogiri.....	3046
39. Kapanewon Dlingo.....	3099
40. Kapanewon Banguntapan.....	3167
41. Kapanewon Pleret.....	3218
42. Kapanewon Piyungan	3289
43. Kapanewon Sewon.....	3337
44. Kapanewon Kasihan	3395
45. Kapanewon Sedayu	3460

Rencana Strategis (Renstra)

Dinas Pariwisata

Kabupaten Bantul

Tahun 2025-2029

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan kepariwisataan merupakan penjabaran dari rencana pembangunan yang telah digariskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029. Pola pembangunan bidang kepariwisataan, merupakan bagian integral dan berkesinambungan antara tahapan dan proses pembangunan yang telah dilakukan dengan kondisi yang diinginkan dan atau akan dicapai dalam skala jangka menengah dan jangka panjang.

Renstra Dinas Pariwisata Tahun 2025-2029 disusun sebagai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan Renstra Perangkat Daerah. Selain itu Renstra disusun berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029. Renstra Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan jangka menengah yang menjadi turunan dari RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah). Renstra juga memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan indikator keberhasilan perangkat daerah yang dirumuskan untuk mewujudkan visi, misi dan sasaran pembangunan daerah. Renstra ini juga menjadi dasar teknis dalam penyusunan rencana kerja tahunan maupun penganggaran perangkat daerah.

Renstra Dinas Pariwisata mengacu pada Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih, sehingga melalui renstra ini akan diketahui apa yang menjadi tujuan dari pembangunan pariwisata dan bagaimana mewujudkannya serta apa yang harus dilakukan. Nilai strategis Renstra Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul Tahun 2025- 2029 antara lain :

- a. Pengembangan pariwisata berbasis lokal dan alam, dengan fokus pada budaya lokal, wisata alam dan minat khusus sebagai daya tarik.

- b. Pemberdayaan masyarakat dan berkelanjutan untuk mendorong manfaat ekonomi masyarakat lokal dan melestarikan budaya.
- c. Meningkatkan kualitas kelembagaan, dan SDM agar layanan pariwisata lebih profesional dan responsif.
- d. Strategi pemasaran dengan mengembangkan promosi melalui media cetak, elektronik, kerja sama baik dalam dan luar negeri untuk meningkatkan kunjungan wisatawan dan lama tinggal.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Rencana Strategis Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 disusun berdasarkan beberapa peraturan dan perundangan yang berkaitan dengan struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul. Adapun peraturan dan perundangan tersebut adalah:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014;
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Daerah Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Daerah Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
6. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025 – 2029;

7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta nomor 20 Tahun 2018 tentang Renstra DIY;
9. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 52 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Bantuan Keuangan Daerah kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023 Nomor 52; Tambahan Berita Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 52)
10. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 43 Tahun 2024 tentang Sistem dan Prosedur Keuangan Daerah (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2024 Nomor 43; Tambahan Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 43)
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bantul Tahun 2025 – 2045;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor : 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;
14. Peraturan Bupati No. 50 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan dokumen Renstra Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 ini sebagai pedoman kerja lima tahunan yang memuat arah kebijakan, strategi, program, dan kegiatan secara terukur bagi Dinas Pariwisata dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangannya. Selain itu untuk menjamin keterpaduan antara perencanaan dan penganggaran agar pelaksanaan program berjalan efektif, tepat sasaran, serta menjadi acuan pengendalian dan evaluasi kinerja untuk mengukur

keberhasilan pembangunan pariwisata. Sedangkan tujuan yang ingin dicapai dalam penyusunan renstra Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul tahun 2025-2029 antara lain :

- a. Menetapkan arah dan prioritas pengembangan pariwisata Kabupaten Bantul yang berdaya saing, berkelanjutan dan berbasis kearifan lokal.
- b. Meningkatkan kualitas destinasi wisata melalui penguatan atraksi, fasilitas dan aksesibilitas yang mendukung kenyamanan wisatawan.
- c. Mendorong peran aktif masyarakat dan pelaku usaha pariwisata dalam pengelolaan destinasi serta pengembangan ekonomi kreatif.
- d. Memperluas jangkauan promosi dan pemasaran pariwisata untuk meningkatkan kunjungan wisatawan.
- e. Mengembangkan kualitas kelembagaan SDM pariwisata yang profesional dan responsif.

1.4 Sistematikan Penyusunan

Rancangan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I	PENDAHULUAN
	1.1 Latar Belakang
	1.2 Dasar Hukum Penyusunan
	1.3 Maksud dan Tujuan
	1.4 Sistematika Penulisan
BAB II	GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
	2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah
	2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah
BAB III	TUJUAN, SASARAN, STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN
	3.1 Tujuan Renstra Perangkat Daerah
	3.2 Sasaran Renstra Perangkat Daerah
	3.3 Strategis Perangkat Daerah
	3.4 Arah Kebijakan Perangkat Daerah
BAB IV	PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
	4.1 Program, Kegiatan, Subkegiatan
	4.2 Kinerja Penyelenggaraan Urusan
BAB V	PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul merupakan salah satu perangkat daerah Pemerintah Kabupaten Bantul, yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul. Sedangkan bila dikaitkan dengan pelaksanaan urusan/kewenangan mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2016 tentang Kewenangan dan Urusan Kabupaten Bantul, maka Dinas Pariwisata mengampu urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan bidang Pariwisata. Kemudian penjabaran dari tugas pokok Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 50 tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas pada Pemerintah Kabupaten Bantul. Dimana Dinas Pariwisata berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, dengan susunan organisasi terdiri dari atas :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretaris, terdiri dari atas :
 1. Subbagian Program dan Keuangan; dan
 2. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- c. Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata;
- d. Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Sumber Daya Pariwisata;
- e. Bidang Pemasaran Pariwisata;
- f. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- g. UPTD.

Dinas Pariwisata mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang pariwisata, dalam menjalankan ketugasannya Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul mempunyai fungsi sebagai :

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang pariwisata
- b. Pelaksanaan kebijakan bidang pariwisata
- c. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang pariwisata
- d. Pelaksanaan administrasi pada Dinas Pariwisata dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Adapun struktur organisasi Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul adalah sebagai berikut :

- a. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan Pemerintahan di bidang pariwisata, dengan memiliki fungsi sebagai :

1. Perumusan rencana kerja dinas
2. pengoordinasian perencanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang pariwisata;
3. perumusan kebijakan teknis bidang pariwisata;
4. pelaksanaan kebijakan teknis bidang pariwisata;
5. penyelenggaraan peningkatan daya tarik destinasi pariwisata;
6. penyelenggaraan pengembangan ekonomi kreatif dan sumber daya pariwisata;
7. penyelenggaraan pemasaran pariwisata;
8. pengoordinasian tugas dan fungsi satuan organisasi Dinas;
9. pengoordinasian pelaksanaan kesekretariatan Dinas;
10. pengoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, hukum, organisasi, ketatalaksanaan, perpustakaan, kearsipan dan kerjasama serta budaya pemerintahan Dinas;
11. pengoordinasian tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan Dinas;
12. pengoordinasian dan pembinaan tugas dan fungsi jabatan fungsional pada Dinas;
13. pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas Dinas; dan
14. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas Dinas

b. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan kesekretariatan dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas unit organisasi di lingkungan Dinas, dengan mempunyai fungsi sebagai :

1. penyusunan rencana kerja Sekretariat;
2. perumusan kebijakan teknis kesekretariatan;
3. penyusunan program Dinas;
4. pengoordinasian pengelolaan keuangan Dinas;
5. pelaksanaan program kesekretariatan;
6. pengoordinasian penyelenggaraan kepegawaian Dinas;
7. pengoordinasian pengelolaan barang milik daerah pada Dinas;
8. pelaksanaan penatausahaan Dinas;
9. pengoordinasian pelaksanaan tugas satuan organisasi di lingkungan Dinas;
10. pengoordinasian dan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan fungsional pada Dinas;
11. pembinaan dan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan fungsional pada Sekretariat;
12. pengoordinasian penyelenggaraan kerumahtanggaan, perpustakaan, kearsipan, dokumentasi, kerjasama dan kehumasan pada Dinas;
13. fasilitasi penyelenggaraan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, hukum, organisasi, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan pada Dinas;
14. pengoordinasian pengelolaan data dan pengembangan sistem informasi Dinas;
15. fasilitasi tindak lanjut pelaksanaan hasil pemeriksaan pada Dinas;
16. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi program serta penyusunan laporan kinerja Dinas;
17. pengoordinasian pelaksanaan administrasi perkantoran;
18. pengoordinasian pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana;
19. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program kerja Sekretariat; dan
20. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Subbagian Program dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program, pemantauan evaluasi, pelaporan, pengelolaan data dan informasi serta pengelolaan keuangan Dinas, dengan mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. penyusunan rencana kerja Subbagian Program dan Keuangan;
2. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis perencanaan, pengendalian dan evaluasi;
3. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana strategis;
4. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran;
5. penyiapan, pengumpulan, pengolahan, penyajian dan pelayanan data dan informasi Dinas;
6. penyiapan bahan penyusunan laporan program dan kegiatan;
7. pengelolaan keuangan Dinas;
8. pelaksanaan program peningkatan, pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan dan sistem pengendalian internal pemerintah pada Dinas;
9. pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan pada Dinas;
10. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Dinas;
11. penyusunan pertanggungjawaban keuangan Dinas;
12. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Subbagian Program dan Keuangan; dan
13. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas penyelenggaraan kepegawaian, kerumahtanggaan, pengelolaan barang, perpustakaan, kearsipan, kehumasan, hukum, organisasi dan ketatalaksanaan Dinas, dan mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. penyusunan rencana kerja Subbagian Umum dan Kepegawaian;
2. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis terkait administrasi umum dan kepegawaian;
3. pengelolaan data kepegawaian Dinas;
4. penyiapan bahan mutasi pegawai Dinas;
5. penyiapan kesejahteraan pegawai Dinas;

6. penyiapan bahan pembinaan pegawai Dinas;
7. penyelenggaraan kerumahtanggaan Dinas;
8. penyelenggaraan perpustakaan Dinas;
9. pengelolaan barang milik daerah pada Dinas;
10. pengelolaan tata persuratan dan kearsipan;
11. penyiapan dan penyelenggaraan kerjasama dan kehumasan Dinas;
12. penyelenggaraan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, hukum, organisasi dan ketatalaksanaan dan budaya pemerintahan pada Dinas;
13. pelaksanaan pelayanan administrasi perkantoran;
14. pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran;
15. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
16. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

c. Bidang Pengembangan Destinasi

Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi dan fasilitasi dalam pengembangan destinasi pariwisata, dengan menyelenggarakan fungsinya sebagai berikut :

1. penyusunan rencana kerja Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata;
2. perumusan kebijakan teknis terkait perencanaan dan pengembangan destinasi pariwisata;
3. penyiapan bahan dan pelaksanaan penetapan, perencanaan serta pengembangan kawasan strategis pariwisata dan daya tarik destinasi pariwisata;
4. pelaksanaan pendataan dan identifikasi kondisi potensi destinasi pariwisata;
5. pelaksanaan penelitian dan pengembangan destinasi pariwisata;
6. pelaksanaan fasilitasi sarana dan prasarana dalam pengembangan destinasi pariwisata;

7. pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan dan pengelolaan kawasan pariwisata dan kawasan strategis pariwisata;
 8. pelaksanaan penyusunan pedoman penataan destinasi pariwisata;
 9. pelaksanaan pengelolaan destinasi pariwisata dan investasi di bidang pariwisata;
 10. pelaksanaan sinegritas pengembangan daya tarik destinasi wisata secara terpadu dengan stakeholder pariwisata dan instansi terkait;
 11. fasilitasi event kepariwisataan;
 12. penyusunan rencana dan pelaksanaan pengembangan investasi di bidang pariwisata;
 13. penyusunan data usaha dan investasi bidang pariwisata;
 14. pengoordinasian pelaksanaan pemungutan retribusi obyek wisata;
 15. pelaksanaan pengadaan sarana pemungutan retribusi atas jasa layanan bidang pariwisata;
 16. pelaksanaan pengembangan sistem informasi pelayanan pemungutan retribusi atas jasa layanan bidang pariwisata;
 17. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pengelola retribusi atas jasa layanan bidang pariwisata;
 18. pelaksanaan pembinaan, pengembangan dan pengawasan jasa usaha pariwisata;
 19. pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang perencanaan, pengelolaan dan pengembangan kawasan dan daya tarik pariwisata;
 20. pengoordinasian, pembinaan dan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan fungsional dan jabatan pelaksana pada Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata;
 21. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kinerja Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata; dan
 22. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.
- d. Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Sumberdaya Pariwisata
 Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Sumberdaya Pariwisata mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi dan

fasilitasi dalam bidang pengembangan ekonomi kreatif dan sumberdaya pariwisata, dengan menyelenggarakan fungsinya sebagai berikut :

1. penyusunan rencana kerja Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Sumberdaya Pariwisata;
2. perumusan kebijakan teknis bidang pengembangan ekonomi kreatif dan sumberdaya pariwisata;
3. pengoordinasian pelaksanaan tugas dalam pengembangan ekonomi kreatif;
4. pengoordinasian pelaksanaan tugas dalam peningkatan kapasitas sumberdaya manusia dan kelembagaan pariwisata;
5. penyediaan prasarana ruang berekspresi, berpromosi dan berinteraksi dalam pengembangan kreatifitas bidang pariwisata;
6. pelaksanaan pengembangan ekosistem ekonomi kreatif;
7. pelaksanaan peningkatan kapasitas ekonomi kreatif tingkat dasar;
8. penyusunan analisis potensi dan pelaksanaan peningkatan kapasitas sumberdaya manusia pariwisata;
9. pelaksanaan peningkatan kapasitas kelembagaan pariwisata;
10. pelaksanaan pengembangan kapasitas pelaku ekonomi kreatif;
11. pelaksanaan pengembangan dan revitalisasi prasarana Kabupaten kreatif;
12. pelaksanaan fasilitasi kekayaan intelektual dan perlindungan hasil kreatifitas;
13. pelaksanaan standardisasi usaha dan sertifikasi profesi di bidang ekonomi kreatif;
14. penyiapan bahan riset dan pendidikan dalam pengembangan ekonomi kreatif;
15. penyiapan bahan penyusunan pedoman standar kompetensi bidang kepariwisataan;
16. peningkatan kualitas masyarakat dalam mendukung pariwisata ;
17. pelaksanaan sertifikasi bagi tenaga kerja bidang pariwisata;
18. pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang pengembangan kapasitas sumberdaya manusia, kelembagaan kepariwisataan dan ekonomi kreatif;

19. pengoordinasian, pembinaan dan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan fungsional dan jabatan pelaksana pada Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Sumberdaya Pariwisata;
20. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kinerja Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Sumberdaya Pariwisata; dan
21. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

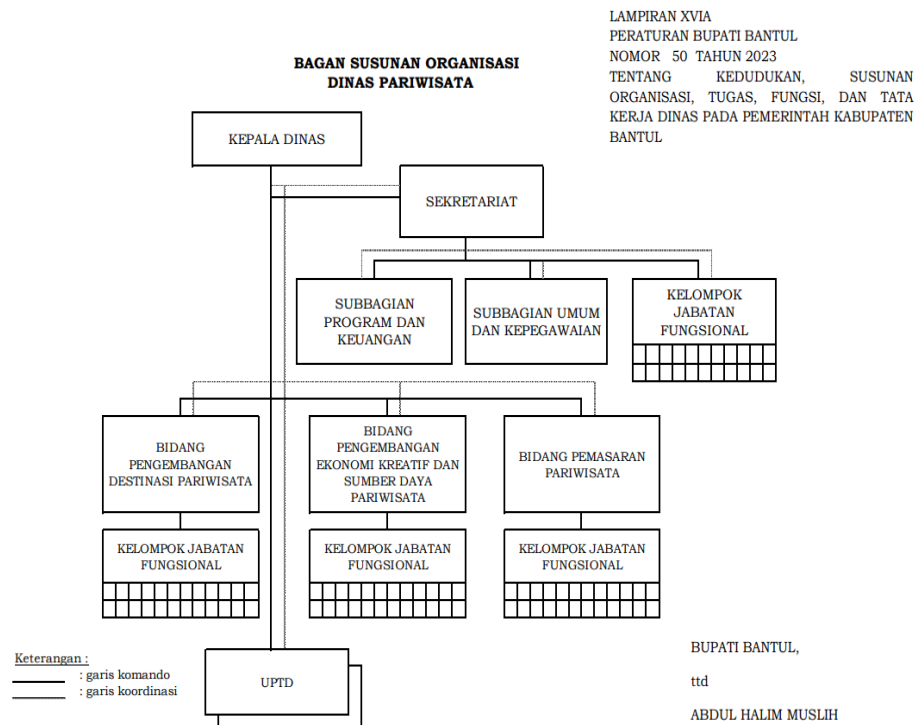
e. Bidang Pemasaran Pariwisata

Bidang Pemasaran Pariwisata mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi dan fasilitasi bidang pemasaran pariwisata, dengan menyelenggarakan fungsinya sebagai berikut :

1. penyusunan rencana kerja Bidang Pemasaran Pariwisata;
2. perumusan kebijakan teknis bidang pelayanan informasi, kerjasama, dan promosi kepariwisataan;
3. pelaksanaan kebijakan bidang pelayanan informasi, kerjasama, dan promosi pariwisata;
4. pelaksanaan kegiatan pemasaran terkait daya tarik, destinasi dan kawasan strategis pariwisata baik di dalam maupun luar negeri;
5. pengelolaan pusat informasi pariwisata, pemberian layanan informasi dan penyebaran bahan informasi pariwisata kepada wisatawan dan masyarakat;
6. pelaksanaan penelitian dan pengembangan potensi pasar kepariwisataan;
7. pelaksanaan kerjasama dengan stakeholder kepariwisataan;
8. fasilitasi pelaksanaan kerjasama pariwisata antar stakeholder kepariwisataan;
9. peningkatan kerjasama dan kemitraan pariwisata dalam dan luar negeri;
10. pelaksanaan pengembangan promosi pariwisata secara terpadu baik di dalam maupun di luar negeri;
11. penyelenggaraan promosi kepariwisataan melalui media cetak, dan elektronik serta media lainnya baik dalam dan luar negeri;

12. pengoordinasian, pembinaan partisipasi dan fasilitasi penyelenggaraan promosi kepariwisataan secara terpadu dengan stakeholder pariwisata dan instansi terkait;
13. pelaksanaan pemanfaatan budaya untuk promosi pariwisata;
14. pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang pelayanan informasi, kerjasama dan promosi kepariwisataan;
15. pengoordinasian, pembinaan dan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan fungsional dan jabatan pelaksana pada Bidang Pemasaran Pariwisata;
16. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kinerja Bidang Pemasaran Pariwisata; dan
17. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Adapun secara ringkas gambaran dan bagan struktur organisasi Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul dapat dilihat pada Gambar 2.1



Sumber : Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul, 2025

Gambar 2 1 Struktur Organisasi Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul

Sumber Daya Perangkat Daerah merupakan suatu ketersediaan yang dimiliki dalam mendukung keberhasilan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul. Secara gambaran kondisi dari sumber daya di Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul dapat dijelaskan dari kondisi kepegawaian maupun sarana dan prasarana. Jumlah SDM di Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul dapat dikategorikan dari jenis pendidikan dan pangkat/golongan, hal ini bisa dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 1
Jumlah SDM Berdasarkan Jenis Pendidikan dan Golongan
Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul Tahun 2025

Jenis Pendidikan							Jml	Gol				Jml
SD	SMP	SMA	Sarmud/ D2/D3	S1	S2	S3		I	II	III	IV	
2	5	22	8	12	6	-	55	2	19	29	5	55

Sumber : Dinas Pariwisata, 2025

Sumber daya yang dimiliki Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul selain dari SDM adalah ketersediaan aset-aset dan sarana dan prasarana pendukung pembangunan dan pengembangan destinasi pariwisata dan komponen pendukungnya sebagai daya tarik kunjungan wisatawan ke Kabupaten Bantul. Adapun ragam aset pariwisata tersebut terlihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 2
Perkembangan Nilai Aset Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul
Tahun 2020-2024

NO	ASET PARIWISATA	JUMLAH				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Tanah	44.772.000	44.772.000	44.772.000	44.772.000	44.772.000
2	Peralatan dan Mesin	5.013773.102	5.090.209.196	549.0486.297	620.6014.243	656.6920.299,4 1
3	Gedung dan Bangunan	51.231.618.670	52.468.959.601	54.027.423.096, 29	5.4704.426.852	5.560.5047.312, 59
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	11.824.198.922	12.383.131.257	12.824.472.069	12.998.523.342	13.367.317.336, 07
5	Aset Tetap Lainnya	437.833	680.690,32	68.0690,32	680.690,32	680.690,32
6	Aset Lainnya (Aset Tidak Berujud)	974.862.500	767.512.500	767.512.500	793.266.000	823.016.000
7	KDP (Konstruksi Dalam Pembangunan)	-	-	-	-	294.5859.157
	Jumlah	69.089.663.027	70.755.265.244, 32	73.155.346.652, 62	74.747.683.127, 32	79.353.612.795, 39

Data sumber : Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul Tahun 2024

Kondisi sarana prasarana yang dimiliki Dinas Pariwisata khususnya yang ada di lapangan, seperti peralatan dan mesin, umumnya sering mengalami kerusakan lebih cepat terkena korosi/berkarat karena berada di wilayah pantai. Dari sisi kualitas dan kuantitas peralatan yang digunakan untuk menangani volume sampah yang cukup besar di obyek wisata pantai, dirasa masih kurang. Oleh karena itu, dalam hal kecukupan aset yang digunakan sebagai modal dalam menjalankan tugas dan fungsi perangkat daerah, masih perlu peningkatan jumlah maupun peningkatan kualitas khususnya untuk obyek wisata pantai agar peralatan tersebut tidak mudah rusak dan tidak mudah berkarat.

Kinerja pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul untuk masyarakat secara langsung dapat dilihat dalam pelaksanaan program, kegiatan dan subkegiatan setiap tahunnya. Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul berupaya untuk mengembangkan sektor pariwisata di Kabupaten Bantul melalui program, kegiatan dan subkegiatan yang dilaksanakan setiap tahunnya. Selain itu, Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul juga menjalin kerjasama dengan pihak-pihak terkait seperti pelaku pariwisata, akademisi, masyarakat dan instansi terkait baik pusat maupun yang ada di daerah dalam rangka pengembangan destinasi, pemasaran, sumber daya pariwisata maupun ekonomi kreatif untuk mewujudkan sinergitas dan keterpaduan. Dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang responsif gender, Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul berkomitmen untuk memperhatikan kebutuhan dan kepentingan masyarakat tanpa membedakan jenis kelamin, usia maupun latar belakang sosial. Dalam pelaksanaan perspektif gender diintegrasikan ke dalam tahapan pelayanan mulai dari perencanaan program, kegiatan sampai pada evaluasi kegiatan, seperti dalam pengembangan destinasi wisata, kegiatan promosi, maupun peningkatan kapasitas SDM pariwisata dan ekonomi kreatif, Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul memperhatikan keterlibatan perempuan dan laki-laki secara seimbang, baik sebagai pelaku usaha pariwisata, pekerja pariwisata maupun penerima manfaat.

Sektor pariwisata merupakan salah satu sektor strategis di Kabupaten Bantul, dimana sektor ini juga memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) khususnya pendapatan melalui retribusi pariwisata.

Besarnya kontribusi sektor ini sangat tergantung pada jumlah wisatawan yang berkunjung ke Kabupaten Bantul. Beragam daya tarik wisata yang ada di Kabupaten Bantul dari wisata alam, wisata budaya, dan wisata buatan. Adapun jumlah kunjungan wisatawan dan pendapatan yang sudah terealisasi pada tabel sebagai berikut :

Tabel 2. 3 Jumlah Kunjungan Wisatawan dan PAD Sektor Pariwisata di Kabupaten Bantul Tahun 2020-2024

No	Tahun	Jumlah Wistawan (orang)	Jumlah PAD (Rp)
1	2020	2.348.313	16.874.969.250,00
2.	2021	2.819.748	13.385.022.250,00
3.	2022	5.687.729	26.513.478.000,00
4.	2023	5.772.527	26.283.785.500,00
5.	2024	5.937.365	30.667.876.500,00

Sumber Data Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul Tahun 2024

Berikut ini disajikan pencapaian kinerja pelayanan perangkat daerah Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul :

Tabel 2. 4 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul Tahun 2020-2024

No	Indikator Kinerja	Target Renstra Tahun 2020-2024					Realisasi Capaian Renstra Tahun 2020-2024					Rasio Capaian				
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 (8)/(3)	14 (9)/(4)	15 (10)/(5)	16 (11)/(6)	17 (12)/(7)
A.	Indikator Tujuan															
	Meningkatkan Ketangguhan Perekonomian Daerah															
B.	Indikator Sasaran															
	Gini Rasio															
1.	Jumlah Kunjungan Wisatawan	1.700.000 orang	1.870.000 orang	2.057.000 orang	2.262.700 orang	2.488.970 orang	2.348.313 orang	2.819.948 orang	5.678.414 orang	5.772.527 orang	5.934.434 orang	1,38	1,51	2,76	2,55	2,38
2.	Lama Tinggal Wisatawan	0,75 hari	1,00 hari	1,25 hari	1,50 hari	1,75 hari	1,56 hari	1,57 hari	2,03 hari	1,78 hari	1,86 hari	2,08	1,57	16,24	1,19	1,06
3.	Jumlah Belanja Wisatawan	-	-	744.188 rupiah/orang	781.397 rupiah/orang	820.467 rupiah/orang	-	-	767.234 rupiah/orang	1.768.976 rupiah/orang	1.857.425 rupiah/orang	-	-	1,03	2,26	2,26
C.	Indikator Program															
1.	Capaian Promosi Pariwisata	80 persen	90 persen	-	-	-	80 persen	90 persen	-	-	-					
2.	Capaian Peningkatan Destinasi Pariwisata	3 buah	3 buah	-	-	-	3 buah	3 buah	-	-	-					
3.	Capaian Mitra Pariwisata	3 mitra	3 mitra	-	-	-	3 mitra	3 mitra	-	-	-					
4.	Cakupan Peningkatan Destinasi Pariwisata	-	-	2,71 persen	3,13 persen	3,13 persen	-	-	2,71 persen	3,13 persen	3,13 persen	-	-	1,00	1,00	1,00

No	Indikator Kinerja	Target Renstra Tahun 2020-2024					Realisasi Capaian Renstra Tahun 2020-2024					Rasio Capaian				
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 (8)/(3)	14 (9)/(4)	15 (10)/(5)	16 (11)/(6)	17 (12)/(7)
5.	Cakupan Peningkatan Kunjungan Wisatawan	-	-	2 persen	2 persen	2 persen	-	-	2 persen	2 persen	2 persen	-	-	1,00	1,00	1,00
6.	Cakupan Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	-	-	-	25 persen	35 persen	-	-	-	25 persen	35 persen	-	-	1,00	1,00	1,00
7.	Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	-	-	2 CBT	2 CBT	2 CBT	-	-	2 CBT	2 CBT	2 CBT	-	-	1,00	1,00	1,00

Pada periode tahun 2020-2024 Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari retribusi pariwisata mengalami perubahan baik penurunan dan kenaikan selama perkembangan waktu akibat adanya pandemi *Covid-19*. Hal ini bisa dilihat dari jumlah kunjungan dan pendapatan retribusi dari tahun 2020 jumlah kunjungan wisatawan secara keseluruhan baik yang berretribusi maupun yang non retribusi yang dikelola oleh masyarakat atau desa wisata sebanyak 2.348.313 orang sedangkan jumlah pendapatan retribusi obyek wisata yang dikelola sebesar Rp16.874.969.250,00. Hal ini menunjukkan adanya penurunan yang sangat signifikan dibandingkan pada tahun 2019 sebelum adanya pandemi *Covid-19* sebesar Rp31.756.578.250,00 atau sebesar 88,19% penurunannya. Mulai tahun 2022 sedikit demi sedikit pertumbuhan jumlah kunjungan wisatawan mulai bertambah dengan mulainya dibukanya kembali destinasi wisata yang selama pandemi *Covid-19* banyak yang tutup akibat tidak adanya biaya operasional dan permodalan. Sampai dengan tahun 2024 jumlah kunjungan wisatawan mencapai 5.937.365 orang dengan jumlah pendapatan retribusi obyek wisata yang dikelola sebesar Rp30.667.876.500,00. Kenaikan ini dipengaruhi oleh adanya dukungan dari program kegiatan yang dilaksanakan diantaranya dalam pelaksanaan promosi pariwisata baik melalui pameran, media cetak, media elektronik, travel dialog dan kerja sama dengan mitra. Selain itu juga adanya peningkatan daya tarik destinasi wisata baik dalam penyelenggaraan kegiatan pengelolaan daya tarik wisata di semua obyek wisata maupun dalam peningkatan pengelolaan sarana dan prasarana destinasi wisata dan pemberdayaan sumber daya manusia dan kelembagaan pariwisata. Namun pada tahun 2023 jumlah Pendapatan Asli Daerah untuk retribusi obyek wisata mengalami penurunan sebesar 0,87% dibandingkan dengan realisasi tahun 2022, hal ini dikarenakan pada tahun 2023 mulai dibukannya Jembatan Parangtritis II sehingga banyak pengunjung yang menggunakan akses jalan menuju ke obyek wisata dengan tidak melalui pintu Tempat Pemungutan Retribusi (TPR) dengan maksud hanya untuk menikmati JJLS dan melintasi Jembatan Parangtritis II, naaman pada hakekatnya pengunjung tetap masuk obyek wisata.

Adapun kinerja keuangan Perangkat Daerah Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul dapat disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2. 5 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul Tahun 2020-2024

No	Uraian Sumber Keuangan	Anggaran Tahun 2020-2024					Realisasi Tahun 2020-2024					Rasio Realisasi dan Anggaran				
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	12	13	14	15	16
1.	APBD															
	Belanja Operasi :	13.381.289.093	-	-	-	-	8.722.066.612	-	-	-	-	93,00%	-	-	-	-
	Belanja Tidak Langsung	4.243.043.843	-	-	-	-	3.586.273.670	-	-	-	-	84,52%	-	-	-	-
	Belanja Langsung	9.953.913.650	-	-	-	-	9.630.334.041	-	-	-	-	96,75%	-	-	-	-
	Belanja Operasi :		16.745.610.878	34.348.829.898	20.115.965.123	24.944.221.524	-	16.116.712.416	19.219.859.259	19.680.706.586,23	20.164.138.911,94	-	96,24%	55,96%	97,84%	80,85%
	Belanja Pegawai		6.502.271.878	6.894.073.192	6.701.127.017	7.287.128.577	-	6.199.992.667	6.266.435.867	6.562.699.746	6.842.872.119	-	95,35%	90,90%	97,93%	93,90%
	Belanja Barang dan jasa	-	8.366.156.178	12.011.061.744	11.876.950.882	8.852.570.202	-	8.053.077.389	11.549.735.226	11.600.934.739,65	8.768.006.486,25	-	96,26%	96,16%	97,68%	99,05%
	Belanja Modal	-	1.877.182.822	15.443.694.962	1.537.887.224	8.804.522.745	-	1.863.642.360	1.403.688.166	1.517.072.100,58	4.553.260.306,69	-	99,28%	9,09%	98,65%	51,71%
2.	DAK															
	DAK Fisik	-	-			7.374.871.000					4.204.583.287					57,01%
	DAK Non Fisik	437.135.000	862.578.000		200.000.000	1.762.435.000	435.827.500				1.755.108.983	99,70%				99,58%
3.	Danais	475.000.000	199.326.500	980.000.000	1.197.750.000	1.100.000.000	472.440.000	194.986.500	977.419.850	1.092.616.040	1.098.663.800	99,82%	97,82%			99,88%

Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pengelolaan pendanaan pelayanan perangkat daerah antara lain: prosedur/mechanisme, jumlah, dan kualitas personil (sumber daya manusia), dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Prosedur dan mekanisme dalam penganggaran serta pelaksanaannya tidak ada hambatan berarti.
2. Jumlah dan kualitas personil, masih adanya keterbatasan yaitu kurangnya SDM yang memiliki kompetensi/sertifikasi barang dan jasa.
3. Progres pelaksanaan program berjalan lancar dengan adanya monitoring dan evaluasi.

Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan perangkat daerah Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul dalam pelayanan perangkat daerah antara lain dalam peningkatan perekonomian dengan meningkatnya jumlah pendapatan asli daerah dari sektor pariwisata maka menjadikan peluang bagi peningkatan perekonomian masyarakat. Disamping itu dengan makin terbukanya masyarakat untuk mengikuti pelatihan atau sosialisasi tentang Sapta Pesona dan Sadar Wisata. Juga peningkatan kualitas dan kuantitas *event* yang diselenggarakan serta kepedulian dunia pendidikan yang cukup tinggi terutama bagi perguruan tinggi dalam mendukung pengembangan kepariwisataan. Sedangkan tantangan yang dihadapi masih terbatasnya kebutuhan untuk pelatihan atau pembinaan bagi SDM Pariwisata yang berasal dari stakeholder, pelaku wisata maupun masyarakat umum, dan masih kurangnya penyelenggaraan *event-event* wisata baik tingkat daerah maupun nasional yang sangat berpengaruh dalam peningkatan jumlah kunjungan wisatawan dan peningkatan pendapatan asli daerah. Disamping itu bentuk liberalisasi perdagangan pasar bebas dalam negeri dan implementasi yang mengharuskan kepariwisataan mempunyai daya saing tinggi dan berstandar internasional juga merupakan tantangan dalam pelayanan perangkat daerah.

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

2.2.1 Permasalahan Perangkat Daerah

Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Perangkat Daerah merupakan salah satu bagian penting dan sangat

menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi permasalahan yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokratis dapat dipertanggungjawabkan. Perencanaan pembangunan antara lain dimaksudkan agar layanan perangkat daerah senantiasa mampu menyelaraskan diri dengan lingkungan dan aspirasi pengguna layanan. Oleh karena itu, perhatian kepada mandat dari masyarakat dan lingkungan eksternalnya merupakan perencanaan dari luar ke dalam yang tidak boleh diabaikan. Dengan melakukan identifikasi permasalahan secara tepat akan didapatkan isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi perangkat daerah yakni kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi perangkat daerah dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

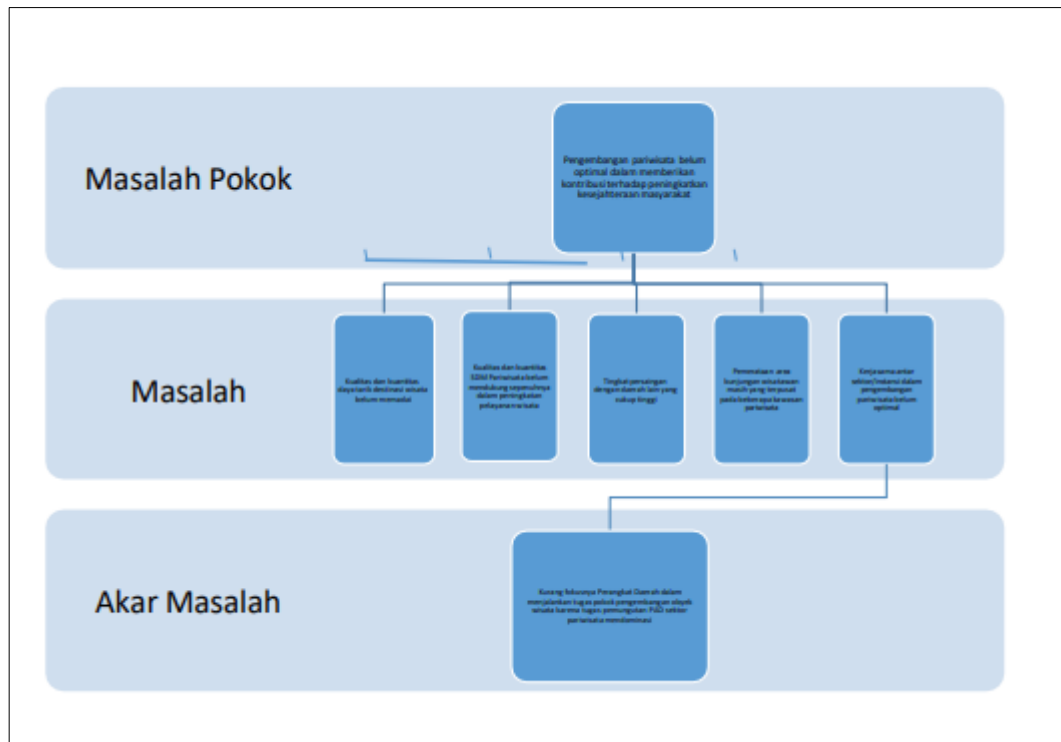
Salah satu cara dalam melakukan identifikasi permasalahan sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah adalah dengan melakukan analisis permasalahan yang meliputi sisi internal perangkat daerah dan sisi eksternal perangkat daerah sehingga akan didapatkan lingkup permasalahan pokok yang akan menjadi bagian dari kajian isu-isu strategis perangkat daerah. Gambaran umum dari identifikasi permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Kepariwisataaan Kabupaten Bantul sampai saat ini masih mengandalkan wisata alam pantai yang masih dihadapkan pada beberapa persoalan seperti penataan kawasan yang belum sesuai tata ruang, terbatasnya sarana dan prasarana serta fasilitas obyek wisata (rambu-rambu, papan informasi, tempat sampah dan peralatannya, akses jalan lingkungan, dll), kualitas pengelolaan kebersihan obyek wisata yang belum optimal, kurangnya kesadaran pengunjung dalam membuang sampah dan kurangnya pemerataan area sebaran kunjungan ke obyek wisata yang

masih didominasi oleh Pantai Parangtritis sehingga berdampak pada ketidakmerataan pengembangan ekonomi masyarakat.

2. Masih terbatasnya kemampuan untuk melakukan upaya-upaya peningkatan daya tarik wisata dengan atraksi/kesenian/festival/*event* wisata yang berkelas sebagai bagian dari pengenalan dan promosi pariwisata Kabupaten Bantul dalam upaya untuk meningkatkan jumlah kunjungan wisata.
3. Aktualisasi dan penerapan konsep SAPTA PESONA (aman, tertib, bersih, sejuk, indah, ramah, dan kenangan) dan SADAR WISATA di kalangan masyarakat dan pelaku usaha pariwisata Kabupaten Bantul belum optimal.
4. Pertumbuhan industri pariwisata yang cukup pesat dalam bentuk desa wisata, kerajinan dan usaha-usaha pariwisata lain seperti destinasi baru di Kabupaten Bantul belum diimbangi dengan sinergitas yang baik antar pemangku kepentingan (masyarakat, pemerintah dan swasta). Jumlah Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) sejumlah 50 kelompok dan desa wisata sejumlah 54 desa (sumber data: Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul, 2024).
5. Dengan dibangunnya JJLS (Jalur Jalan Lintas Selatan), Jembatan Parangtritis II, Jembatan Pandansimo, dan Kelok 23 yang posisinya cukup dekat dengan wilayah pantai akan berpengaruh terhadap perkembangan kepariwisataan khususnya obyek wisata pantai jika tidak dipersiapkan dengan baik disertai perencanaan yang matang.
6. Dengan berbagai keterbatasan dan permasalahan, peluang berusaha masyarakat di bidang pariwisata cukup menjanjikan bagi masyarakat, karena pariwisata merupakan sektor andalan Daerah Istimewa Yogyakarta. Namun, sektor pariwisata sangat rentan dengan isu-isu seperti situasi politik, bencana alam, dan yang terbaru seperti isu wabah penyakit, yang ditetapkan sebagai bencana non alam oleh Pemerintah Republik Indonesia.

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa permasalahan pokok pariwisata adalah; Pengembangan pariwisata belum optimal dalam memberikan kontribusi terhadap peningkatkan kesejahteraan masyarakat.



Gambar 2 2
Pohon Masalah Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul

Tabel 2. 6
Pemetaan Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1.	Pengembangan pariwisata belum optimal dalam memberikan kontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat	1. Kualitas dan kuantitas daya tarik destinasi wisata belum memadai; 2. Kualitas dan kuantitas SDM Pariwisata belum mendukung sepenuhnya dalam peningkatan pelayanan wisata sehingga tingkat persaingan dengan	1. Masih kurangnya pengembangan sarana dan prasarana destinasi khususnya untuk obyek wisata yang dikelola sebagai upaya dalam peningkatan jumlah kunjungan sekaligus peningkatan PAD. 2. Masih kurangnya pelaku usaha jasa pariwisata yang memiliki kompetensi teknis/keterampilan yang sesuai dengan bidang tugasnya terutama dalam kemampuan penguasaan teknologi

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
		daerah lain cukup tinggi;	informasi, manajemen pemasaran dan kemampuan berbahasa asing.
		3. Pemerataan area kunjungan wisatawan masih yang terpusat pada beberapa kawasan pariwisata;	3. Kurang menariknya paket wisata, branding destinasi dan kurangnya promosi daya tarik wisata dikarenakan kurangnya sarana dan prasarana pendukung destinasi wisata.
		4. Kerjasama antar sektor/instansi dalam pengembangan pariwisata belum optimal.	4. Belum memadainya bentuk Kerjasama baik antar stakeholder maupun dari akademisi.

Hasil identifikasi permasalahan perangkat daerah yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih ini juga akan menjadi input bagi perumusan isu-isu strategis pelayanan Perangkat Daerah. Dengan demikian, isu-isu yang dirumuskan tidak saja berdasarkan tinjauan terhadap kesenjangan pelayanan, tetapi juga berdasarkan kebutuhan pengelolaan faktor-faktor agar dapat berkontribusi dalam pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih. Bupati dan Wakil Bupati terpilih periode 2025-2029 telah merumuskan dan menetapkan visi pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Banatul Tahun 2025-2029, yaitu :

**“Terwujudnya Kabupaten Bantul Yang Maju, Kuat,
Demokratis dan Sejahtera Dalam Bingkai Keberagaman dan
Budaya Istimewa”.**

Adapun keterkaitan dengan pembangunan pariwisata adalah terletak pada Misi 3 yaitu Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi untuk meningkatkan nilai tambah produk, yang difokuskan pada perekonomian berbasis sumber daya lokal yaitu

perekonomian Kabupaten Bantul dengan memanfaatkan kekayaan alam dan kearifan lokal dengan menerapkan teknologi untuk memenuhi kebutuhan pokok daerah dengan tujuan meningkatkan ketangguhan perekonomian daerah, melalui pengembangan pariwisata diantaranya adalah:

1. Meningkatnya daya tarik wisata melalui pembangunan/pengembangan destinasi wisata, *event*/pentas seni;
2. Meningkatnya promosi pariwisata baik melalui media cetak, elektronik atau media lainnya baik dalam atau luar negeri;
3. Meningkatnya penguatan kelembagaan dan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif;

Selain mempertimbangkan kesesuaian penyusunan renstra perangkat daerah dengan visi misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih, juga mempertimbangkan kesesuaian dengan rancangan Renstra Kementerian dan Renstra Dinas Pariwisata DIY. Berikut disajikan telaahan renstra dari Kementerian Pariwisata dan Renstra Dinas Pariwisata DIY, sebagai berikut :

Telaahan Renstra Kementerian Pariwisata Dalam Rencana Strategis Kementerian Pariwisata tahun 2025-2029 tercantum beberapa indikator kinerja antara lain: Tujuan Renstra Kementrian Pariwisata adalah: Daya saing Indonesia pada tingkat global yang meningkat akibat kontribusi pariwisata, terwujudnya pertumbuhan ekonomi Indonesia melalui pariwisata yang unggul dan berkelanjutan dan Kementerian Pariwisata yang andal, profesional, berintegritas, dan berbasis digital. Sedangkan rumusan sasaran Renstra Kementrian Pariwisata adalah :

1. Meningkatnya kapabilitas sistem kepariwisataan
2. Meningkatnya kualitas pariwisata
3. Meningkatnya kualitas governansi, kelembagaan dan SDM aparatur Kementerian Pariwisata

Tabel 2. 7 Indikator tujuan dan sasaran Renstra Kementerian Pariwisata

Indikator Tujuan	Indikator Sasaran
1. Peringkat <i>Travel and Tourism Development Index</i>	1. Indeks Pembangunan pariwisata
2. Rasio PDB Pariwisata	2. Rasio PDB Pariwisata
3. Devisa Pariwisata	3. Jumlah Tenaga Kerja Pariwisata
4. Produktivitas tenaga kerja pariwisata	4. Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara

Indikator Tujuan	Indikator Sasaran
	5. Jumlah kunjungan wisatawan Nusantara
	6. Devisa pariwisata
5. Indeks RB Kementerian Pariwisata	7. Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Pariwisata

Tabel 2. 8
Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Dinas Pariwisata
Kabupaten Bantul Terhadap Sasaran Renstra Kementerian Pariwisata dan
Ekonomi Kreatif

No	Sasaran Renstra K/L	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
1.	Indeks pembangunan pariwisata.	1. Keterbatasan infrastruktur, belum merata kualitas fasilitas, keterbatasan anggaran.	1. Potensi alam dan budaya yang beragam, dukungan pemerintah daerah, partisipasi masyarakat..
2.	Rasio PDB Pariwisata.	2. Ketergantungan pada musim liburan, dampak bencana atau krisis.	2. Pertumbuhan ekonomi kreatif lokal, kerjasama dengan pelaku usaha.
3.	Jumlah tenaga kerja pariwisata.	3. Keterbatasan keterampilan tenaga kerja, rendahnya sertifikasi kompetensi.	3. Banyaknya pelaku UMKM dan industri kreatif, program pelatihan SDM.
4.	Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara.	4. Akses transportasi internasional terbatas, minimnya promosi luar negeri.	4. Daya tarik budaya dan alam unik, promosi digital, event internasional.
5.	Jumlah kunjungan wisatawan nusantara.	5. Persaingan dengan destinasi lain, cuaca ekstrem, kemacetan di jalur wisata.	5. Tren liburan lokal, daya tarik kuliner, <i>event</i> daerah.

No	Sasaran Renstra K/L	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
6.	Devisa pariwisata.	6. Rendahnya harga jual produk lokal, kurangnya variasi atraksi wisata.	6. Produk kerajinan dan kuliner khas, lama tinggal wisatawan meningkat.
7.	Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Pariwisata.	7. Resistensi terhadap perubahan, keterbatasan SDM di bidang teknologi.	7. Dukungan regulasi, digitalisasi layanan publik.

Sedangkan Renstra Dinas Pariwisata DIY, mencantumkan beberapa indikator yang sejalan dengan Renstra Kementerian Pariwisata, yaitu sebagai berikut:

1. Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan di daerah tujuan wisata
2. Meningkatnya lama tinggal wisatawan
3. Meningkatnya pemasaran yang efektif

Isu strategis Renstra Dinas Pariwisata DIY antara lain :

1. Keistimewaan DIY yang mempunyai nilai historis yang tinggi dalam perkembangan sejarah Indonesia selaras dengan trend pariwisata dunia, yang bergeser dari minat rekreasi (*leisure*) menjadi wisata minat khusus misalnya *culture experince*.
2. Yogyakarta *International Airport* yang sudah mulai beroperasi tahun 2020 diharapkan mampu meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara dan nusantara. Terbukanya akses penerbangan intrernasional langsung (*direct flight*) untuk negara potensial wisatawan mancanegara.
3. Strategi Komunikasi pemasaran yang belum terpadu. Berkembangnya *New Media Marketing* yang mengacu pada pemanfaatan serangkaian teknik pemasaran modern (berbasis internet) dan penggunaan teknologi informasi.
4. Peningkatan SDM Pariwisata yang kompeten, profesional dan tersertifikasi untuk meningkatkan daya saing pariwisata DIY.

5. Strategi penanganan pasca pandemi *Covid-19* untuk normalisasi pariwisata DIY agar menumbuhkan kepercayaan wisatawan yang berkunjung ke DIY (*Cleanlinnes, Healthy, and Safety*).
6. Tujuan Renstra Pariwisata DIY Meningkatkan daya saing Pariwisata untuk kemajuan perekonomian DIY.
7. Sasaran Renstra Pariwisata DIY Meningkatnya kontribusi sektor pariwisata dalam perekonomian dan Meningkatnya jumlah belanja wisatawan.
8. Indikator tujuan dan sasaran Renstra Pariwisata DIY nilai sektor akomodasi dan makan minum dalam PDRB DIY dan spending money wisatawan.

Tabel 2. 9
Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Dinas Pariwisata
Kabupaten Bantul
Terhadap Sasaran Renstra Dinas Pariwisata DIY

No	Sasaran Renstra Propinsi	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
1. 2.	Meningkatnya kontribusi sektor pariwisata dalam perekonomian. Meningkatnya jumlah belanja wisatawan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lokasi DIY yang berada di sabuk gunung berapi (<i>Ring of Fire</i>). 2. Persaingan dengan obyek wisata sejenis yang berdekatan di sekitar wilayah DIY. 3. Kerawanan terhadap bencana alam seperti cuaca ekstrim, gempa bumi tektonik dan vulkanik. 4. Ketatnya persaingan dengan destinasi lain. 5. Tantangan terhadap isu <i>carrying capacities</i> (daya dukung alam dan wilayah) DIY yang berkembang sekarang ini. 6. Kemajemukan masyarakat di destinasi wisata dalam menerapkan SOP New Normal setelah Pandemi Covid - 19. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mempunyai posisi wilayah/daerah yang strategis karena berada ditengah pulau Jawa. 2. Mempunyai nilai historis yang sangat tinggi dalam perkembangan sejarah Indonesia. 3. Mempunyai nilai budaya yang tinggi dengan keberadaan Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat dan Kadipaten Paku Alam. 4. Kebudayaan dan adat istiadat masyarakat Yogyakarta yang masih kental dan mengakar. 5. Keramahmatan dari masyarakat Yogyakarta terhadap wisatawan. 6. Mempunyai keberagaman potensi wisata, mulai dari pegunungan, pedesaan,

No	Sasaran Renstra Propinsi	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
			perkotaan sampai Pantai. 7. Harga yang sangat bersaing dengan destinasi wisata yang lain. 8. Mempunyai banyak Lembaga dan Institusi Pendidikan berkualitas. 9. Memiliki potensi alam dan budaya sebagai wisata edukasi (<i>edu tourism potential</i>).

Dalam pencapaian indikator Dinas Pariwisata telah menyesuaikan dengan indikator tersebut namun masih ada hambatan dalam pencapaian indikator, diantaranya :

1. Belum meratanya kualitas SDM bidang pariwisata;
2. Belum meratanya kualitas obyek wisata dan daya tarik wisata;
3. Sinergitas antar *stakeholder* yang mendukung pengembangan bidang pariwisata belum memadai.

Tabel 2. 10
Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Dinas Pariwisata
Kabupaten Bantul
Terhadap Sasaran Renstra Propinsi

No.	Sasaran Renstra Propinsi	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
1. 2.	Meningkatkan kontribusi sektor pariwisata dalam perekonomian. Meningkatkan kontribusi sektor pariwisata dalam perekonomian.	1. Kemampuan SDM bidang pariwisata yang belum merata kualitasnya. 2. Belum meratanya kualitas obyek dan daya Tarik wisata. 3. Sinergitas antar stakeholder yang mendukung pengembangan bidang pariwisata belum memadai.	1. Tersedia diklat teknis walaupun terbatas pembiayaannya. 2. Telah ada upaya untuk menciptakan destinasi baru baik oleh masyarakat maupun investor di berbagai kawasan. 3. Telah dirintis upaya untuk kolaborasi kegiatan yang dilaksanakan oleh OPD yang satu rumpun.

Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dalam penyusunan rancangan awal rencana strategis Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul :

a. Telaahan RTRW.

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul, terdapat pembagian Kawasan Strategis antara lain;

- 1) Kawasan Strategis Pendayagunaan SDA dan/atau teknologi tinggi (Kawasan Pantai Selatan untuk pembangkit listrik tenaga angin dan gelombang laut)
- 2) Kawasan Strategis Lindung dan Budidaya (Kawasan Parangtritis dan gumuk pasir)
- 3) Kawasan Strategis Pengembangan Pesisir dan Pengelolaan Laut (Pantai Depok, Pantai Samas, Pantai Kuwaru dan Pantai Pandansimo).

Tabel 2. 11
Hasil Telaah RTRW Dan Implikasi Terhadap Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pariwisata
Kabupaten Bantul

Rencana Struktur Ruang/Pola Ruang	Struktur/Pola Ruang Saat ini	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang	Pengaruh Rencana Struktur Ruang Terhadap Kebutuhan Pelayanan Perangkat Daerah	Arahan Loksi Pengembangan Layanan Perangkat Daerah	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
Telaah Rencana Pola Ruang						
Kawasan Budidaya	Kawasan Budidaya	Peningkatan Daya Tarik Destinasi Wisata	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Pengelolaan kawasan strategis Pariwisata Kabupaten/Kota Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota	Kawasan peruntukan pariwisata terdapat di kawasan Kasongan – Tembi – Goa Selarong dan sekitarnya sebagai sentra kerajinan, wisata alam, wisata kuliner dan desa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 4-45 wisata; kawasan Pleret – Imogiri – Mangunan – Dlingo sebagai kawasan wisata	Selama ini status tanah belum clear dan clean baik tanah kas desa maupun tanah SG.	Perlu koordinasi dengan wilayah setempat yang ada destinasi wisata atau ijin Gubernur untuk tanah SG dan perdes untuk yang menggunakan tanah desa.

Rencana Struktur Ruang/Pola Ruang	Struktur/Pola Ruang Saat ini	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang	Pengaruh Rencana Struktur Ruang Terhadap Kebutuhan Pelayanan Perangkat Daerah	Arahan Lokasi Pengembangan Layanan Perangkat Daerah	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
				budaya, wisata alam, kerajinan, dan desa wisata; kawasan Pantai Parangtritis – Depok – Samas – Kuwaru dan sekitarnya sebagai wisata alam wisata pendidikan, wisata minat khusus, wisata kuliner, dan wisata dirgantara; kawasan terpadu penanda keistimewaan di perbukitan parangtritis		

b. Telaahan KLHS.

Dinas Pariwisata memiliki lima indikator TPB. Berdasarkan hasil analisis terdapat empat indikator yang telah tercapai dan satu indikator yang tidak ada data. Diharapkan indikator TPB untuk bagian Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul yang belum memiliki data agar kedepannya data tersebut dapat tersedia. Capaian dan Proyeksi TPB untuk Dinas Pariwisata dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 12 Capaian dan Proyeksi TPB Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul

No Indikator	Indikator	Capaian Eksiting 2023	Proyeksi Capaian Indikator TPB (BAU)					
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
8.9.1.(a)	Jumlah wisatawan mancanegara.	2,360.00	3189.33	4877.78	5993.48	7491.01	8733.99	10146.67
8.9.1.(b)	Jumlah kunjungan wisatawan nusantara	5,770,167	6104.363	6438.559	6772.755	7106.951	7441.147	7775.343
8.9.1.(c)	Jumlah devisa sektor pariwisata.	26,283,785,500	22.570.643.625	28.412.613.325	31.266.812.872	34.121.012.420	35.842.160.474	40.118.078.381
8.9.1*	Proporsi kontribusi pariwisata terhadap PDB	11.57	11.57	11.57	11.57	11.57	11.57	11.57
8.9.2*	Jumlah pekerja pada industri pariwisata dalam proporsi terhadap total pekerja.	TAD	TAD	TAD	TAD	TAD	TAD	TAD

Sumber: analisis, 2024

Tabel 2. 13 Status Capaian dan Proyeksi Indikator TPB Dinas Pariwisata

No Indikator	Indikator	Startus Capaian Eksiting 2023	Status Proyeksi Capaian Indikator TPB (BAU)					
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
8.9.1.(a)	Jumlah wisatawan mancanegara.	SS	SS	SS	SS	SS	SS	SS
8.9.1.(b)	Jumlah kunjungan wisatawan nusantara	SS	SS	SS	SS	SS	SS	SS
8.9.1.(c)	Jumlah devisa sektor pariwisata.	SS	SS	SS	SS	SS	SS	SS
8.9.1*	Proporsi kontribusi pariwisata terhadap PDB	SS	SS	SS	SS	SS	SS	SS
8.9.2*	Jumlah pekerja pada industri pariwisata dalam proporsi terhadap total pekerja.	TAD	TAD	TAD	TAD	TAD	TAD	TAD

Sumber: analisis, 2024

2.2.2 Isu Strategis Perangkat Daerah

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokratis dapat dipertanggungjawabkan. Perencanaan pembangunan antara lain dimaksudkan agar layanan perangkat daerah senantiasa mampu menyelaraskan diri dengan lingkungan dan aspirasi pengguna layanan. Oleh karena itu, perhatian kepada mandat dari masyarakat dan lingkungan eksternalnya merupakan perencanaan dari luar ke dalam yang tidak boleh diabaikan.

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi perangkat daerah adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi perangkat daerah dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka Panjang

Berdasarkan kajian aspek-aspek sebagaimana tersebut di atas maka dapat disampaikan isu-isu strategis pembangunan pariwisata di Kabupaten Bantul ditinjau dari gambaran pelayanan perangkat daerah, sasaran jangka menengah pada Renstra Propinsi DIY, dan RTRW Kabupaten Bantul sebagai berikut:

1. Revitalisasi pengembangan destinasi wisata yang berfokus pada keunikan dan keunggulan potensi masing-masing destinasi;
2. Pengembangan pariwisata minat khusus melalui pengembangan pariwisata pedesaan (desa-desa wisata) dengan mengedepankan aspek pemberdayaan masyarakat (*Community Based Tourism*);
3. Mengoptimalkan peran berbagai media informasi untuk promosi dan penyebarluasan informasi pariwisata melalui media cetak dan elektronik;

4. Mengoptimalkan kemitraan dan kerjasama antar pemangku kepentingan dalam pembangunan destinasi wisata dalam upaya meningkatkan daya tarik dan pelayanan wisata;
5. Peningkatan kualitas SDM dengan menjalin kerjasama dengan perguruan tinggi dan akademisi;
6. Peningkatan investasi kepariwisataan melalui fasilitasi kemudahan perijinan.

Dari keenam isu strategis di atas, ditinjau dari gambaran pelayanan perangkat daerah, sasaran jangka menengah pada Renstra Propinsi DIY, dan RTRW Kabupaten Bantul semuanya telah linear dengan isu strategis pembangunan pariwisata Kabupaten Bantul yaitu pengembangan pariwisata belum maksimal dalam memberikan kontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, dalam menentukan tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah pembangunan kepariwisataan pada pelayanan perangkat daerah Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul, keenam isu strategis tersebut menjadi dasar pertimbangan arah kebijakan.

Selain permasalahan dan isu strategis pada bab ini disampaikan terkait restorasi Gumuk Pasir Parangtritis dan tindak lanjut penyusunan master plan kawasan pesisir selatan. Untuk restorasi Gumuk Pasir Parangtritis bisa disampaikan bahwa Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki 20 Situs Warisan Geologi (Geosite) sesuai Surat Keputusan Menteri ESDM Nomor 13.K/Hk.01/MEM.G/2021 tentang Warisan Geologi Daerah Istimewa Yogyakarta. Salah satu Geosite tersebut adalah Gumuk Pasir Parangtritis yang menjadi gumuk pasir istimewa karena satu-satunya gumuk pasir di pantai selatan Jawa. Gumuk Pasir Parangtritis telah ditetapkan sebagai warisan bumi DIY sejak tahun 2014 melalui Keputusan Kepala Badan Geologi Nomor 1157. K/40/BGL/2014 tentang Penentuan Kawasan Cagar Alam Geologi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Kelestarian Gumuk Pasir Parangtritis sangat dipengaruhi oleh proses aeolian yang pada saat ini mengalami distraksi oleh beberapa fenomena di lapangan. Gangguan terhadap proses aeolian di Gumuk Pasir Parangtritis disebabkan oleh tersumbatnya lorong angin di arah selatan. Lorong angin

merupakan jalur transportasi angin yang membawa material berupa pasir ke arah daratan.

Beberapa penyebab kerusakan atau tidak terbentuknya gump pasir secara alami akibat terhambatnya gerakan pasir ke daratan terhalang pepohonan yang berada di selatan gump pasir, dan aktivitas manusia yang dilakukan di kawasan gump pasir. Solusi untuk permasalahan ini adalah upaya restorasi. Restorasi Gump Pasir Parangtritis menjadi program super prioritas dalam pengelolaan Geopark Jogja. Restorasi Gump Pasir merupakan bagian dari pelaksanaan kebijakan pengelolaan Satuan Ruang Strategis Kasultanan Samas–Parangtritis.

Restorasi Gump Pasir Parangtritis yang harus dilakukan meliputi:

1) Penyelamatan:

- a. penataan vegetasi, bangunan liar, dan bentukan lain yang mengganggu pembentukan secara alamiah;
- b. pelarangan kendaraan bermotor atau tidak bermotor yang memasuki Zona Inti, kecuali pada jalur jalan lintas selatan;
- c. pencegahan dari kerusakan;
- d. penghentian kegiatan penambangan pasir liar;
- e. pertahanan pembentukan alamiah;
- f. pengonsolidasian secara bertahap, terhadap lahan milik pribadi yang berada di zona inti Geosite.

2) Pengamanan:

- a. penertiban;
- b. peningkatan partisipasi masyarakat setempat.

3) Pemeliharaan:

- a. pengaturan kegiatan pemanfaatan secara spesifik;
- b. penjagaan kualitas ekosistem;
- c. penjagaan kebersihan;
- d. pencegahan kerusakan Geosite.

Mengacu pada Rencana Aksi Restorasi Gump Pasir Parangtritis Tahun 2024-2029 Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul ikut berpartisipasi dalam restorasi Gump Pasir diantaranya penebangan pohon. Aktivitas

penebangan pohon ini dimulai sejak tahun 2024 dengan luas area hasil penebangan pohon seluas + 4,1 Hektar dapat dilihat dalam gambar berikut :



Gambar 2 3 Luas Area Penebangan Pohon tahun 2024

Selain penanganan gumuk pasir langkah strategis Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul dalam mengoptimalkan potensi destinasi wisata sekaligus menjawab tantangan infrastruktur baru yang sedang berkembang. Kehadiran Jembatan Pandansimo, Jembatan Parangtritis, serta aksesibilitas Kelok 23 sebagai tindak lanjut dari penyusunan master plan pantai selatan, bisa membuka peluang besar bagi peningkatan kunjungan wisatawan, namun juga memerlukan penataan ruang yang terarah, berkelanjutan, dan selaras dengan daya dukung lingkungan. Sebagai tindak lanjut, beberapa langkah strategis yang akan dilakukan adalah:

1. Integrasi infrastruktur baru dalam perencanaan Jembatan Pandansimo dan Jembatan Parangtritis akan diintegrasikan sebagai pintu gerbang utama menuju kawasan pantai, sehingga perencanaan tata ruang kawasan perlu diarahkan untuk menciptakan koridor wisata terpadu yang menghubungkan Pantai Pandansimo, Pantai Parangtritis dan kawasan disekitarnya.
2. Pengembangan kawasan wisata terpadu di Kelok 23 yang menjadi jalur strategis menuju kawasan pantai akan dikembangkan sebagai view point wisata dan rest area, sehingga tidak hanya berfungsi sebagai jalur transportasi tapi juga juga bisa menambah daya tarik wisatawan.

3. Penguatan ekonomi kreatif berbasis lokal dengan meningkatnya arus wisatawan dengan adanya kemudahan akses maka perlu disiapkan ruang bagi pelaku ekonomi kreatif dan UMKM lokal seperti pusat kuliner, kerajinan dan atraksi budaya disepanjang jalur strategis yang terhubung dengan jembatan dan kelok 23.
4. Manajemen daya dukung lingkungan master plan akan memuat strategi pengelolaan kawasan pesisir agar pengembangan wisata tidak menimbulkan degradasi lingkungan, dengan menerapkan konsep pariwisata berkelanjutan. Disamping itu kolaborasi dalam menindaklanjuti penyusunan master plan perlunya melibatkan berbagai pemangku kepentingan baik dari pemerintah daerah, desa wisata, akademisi dan pelaku usaha pariwisata agar rencana pengembangan dapat terimplementasi dengan baik.

Dengan tindak lanjut tersebut, Master Plan Pantai Selatan diharapkan menjadi pedoman komprehensif bagi pengembangan destinasi wisata yang tidak hanya meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan, tetapi juga memperkuat ekonomi lokal dan menjaga kelestarian lingkungan.

Sumbu Filosofi Yogyakarta menjelaskan bahwa Sumbu Filosofi ini merupakan warisan dunia yang harus dijaga kelestariannya. Kawasan Sumbu Filosofi terletak di dua wilayah administratif, yaitu Kota Yogyakarta di bagian utara dan Kabupaten Bantul di bagian selatan. Agar koordinasi terkait dengan pelestarian Sumbu Filosofi dapat berjalan dengan lancar, maka dibentuklah Balai Pengelola Kawasan Sumbu Filosofi atau BPKSF.

Kawasan Sumbu Filosofi Yogyakarta terbagi atas tiga zona. Zona inti, zona penyangga (*buffer zone*), dan zona pengembangan (*wider setting*). Penataan Kawasan Sumbu Filosofi sudah dimulai dari kawasan utara, dimana kawasan utara merupakan kawasan administrasi dari Kota Yogyakarta. Penataan kawasan Sumbu Filosofi ini harus dapat menyelesaikan tekanan pembangunan, tekanan lingkungan, kesiapsiagaan terhadap bencana, pariwisata berkelanjutan, dan masyarakat sekitar sesuai dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta No.2 tahun 2024 Tentang Pengelolaan Warisan Dunia Sumbu Filosofi Yogyakarta.

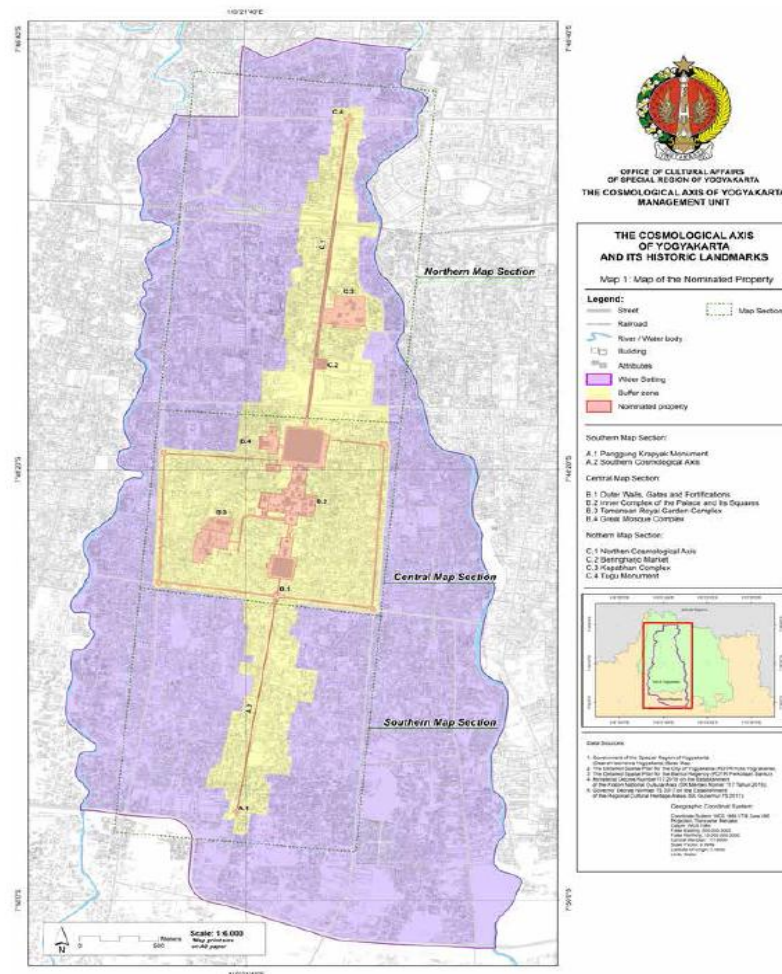


FIGURE iii.1 MAP 1: MAP OF THE NOMINATED PROPERTY

Sumber : *The Cosmological Axis of Yogyakarta and Its Historic Landmarks Management Plan*
Gambar 2 4 **Peta Zonasi Kawasan Sumbu Filosofi Yogyakarta**

Pengelolaan Kawasan Sumbu Filosofi bagian selatan khususnya Panggung Krayak yang merupakan wilayah administratif Kabupaten Bantul masih mengalami kesulitan. Hal ini disebabkan oleh belum adanya sinergitas program kegiatan pada stakeholder terkait pada Kawasan Sumbu Filosofi bagian selatan. Penataan Sumbu Filosofi masih belum terkoordinasi dengan baik. Proses Proses Penyusunan Rencana Aksi Pengelolaan Sumbu Filosofi Yogyakarta di Kabupaten Bantul dilakukan dengan mengikutsertakan semua pemangku kepentingan, sehingga dapat menghasilkan rencana aksi yang sinergis dan komprehensif.



Gambar 2 5
Proses Penyusunan Rencana Aksi Pengelolaan Sumbu Filosofi di Kabupaten Bantul

Rencana Aksi Pengelolaan Sumbu Filosofi Yogyakarta di Kabupaten Bantul merupakan instrumen strategi yang berisi satu atau lebih program rencana aksi dan kegiatan indikatif yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah dan/atau lembaga pelaksana untuk mencapai sasaran dan tujuan Pengelolaan Sumbu Filosofi Yogyakarta di Kabupaten Bantul, serta untuk menyusun perencanaan sumber pendanaan dalam pelaksanaan rencana aksi.

Matriks Rencana Aksi Pengelolaan Sumbu Filosofi Yogyakarta di Kabupaten Bantul terbagi dalam permasalahan sesuai dengan amanat Pergub No.2 tahun 2024. Tahapan tahun pelaksanaan aksi pengelolaan ditetapkan mulai saat penyusunan rencana aksi hingga tahun berakhirnya masa RPJMD yaitu 2024 sampai tahun 2029. Permasalahan sesuai dengan amanat Pergub No.2 tahun 2024, yaitu:

1. Tekanan Pembangunan:

- b) Update rencana tata bangun dan lingkungan;
- c) Proyek infrastruktur publik;
- d) Penerapan HIA;
- e) Perbaikan fasad dan reklame di sepanjang Warisan Dunia Sumbu Filosofi Yogyakarta sisi selatan;
- f) Relokasi kabel bawah tanah;
- g) Penyelenggaraan infrastruktur pasif telekomunikasi;

- h) Pembatasan dan pengawasan terhadap bangunan bertingkat tinggi.
2. Tekanan Lingkungan:
- a) Pengelolaan lalu lintas;
 - b) Penanaman kembali vegetasi penanda keistimewaan sisi selatan;
 - c) Infrastruktur pejalan kaki sisi selatan.
3. Tekanan Bencana Alam dan Kesiapsiagaan Bencana:
- a) Rencana pengurangan resiko bencana untuk keseluruhan zona inti;
 - b) Petunjuk Teknis Pengelolaan Darurat Cagar Budaya Pasca bencana Alam;
 - c) Peralatan dan Papan Petunjuk Bencana;
4. Pariwisata Berkelanjutan:
- a) Pembangunan Pusat Pengunjung Panggung Krapyak;
 - b) Pembangunan Fasilitas Toilet Umum di sepanjang zona inti wilayah Bantul.
5. Tekanan Masyarakat Sekitar:
- a) Keterlibatan Masyarakat dan Pembangunan Berkelanjutan.

Matriks Rencana Aksi Pengelolaan Sumbu Filosofi Yogyakarta di Kabupaten Bantul terdapat pada tabel berikut ini:

Tabel 2. 14 RENCANA AKSI PENGELOLAAN SUMBU FILOSOFI YOGYAKARTA DI KABUPATEN BANTUL

No	Program Kerja	Uraian Program Kerja	Aktivitas	Lokasi	Indikator	Satuan	Indikasi Target						Keterangan	Perangkat Daerah/ Penanggungjawab
							2024	2025	2026	2027	2028	2029		
1.	Penyelesaian Pariwisata Menuju Pariwisata Berkelanjutan	Pembangunan Pusat Pengunjung Panggung Krapyak	Kajian Daya Dukung Pariwisata											
			Kajian daya dukung pariwisata zona inti Panggung Krapyak	Kawasan Sumbu Filosofi	"Tersedianya rekomendasi Daya Dukung Pariwisata di Kawasan Panggung Krapyak	doku men		1						Dispar
			Penyusunan DED Pengembangan daya tarik wisatawan	Kawasan Sumbu Filosofi	Tersedianya DED Pengembangan Daya Tarik Wisatawan	doku men			1					Dispar
			Pembangunan pengembangan daya tarik wisatawan	Kawasan Sumbu Filosofi	Terlaksananya pengembangan pengembangan daya tarik wisatawan	paket				1				Dispar
			Pemeliharaan dan pengembangan daya tarik wisatawan	Kawasan Sumbu Filosofi	Pemeliharaan dan pengembangan pengembangan daya tarik wisatawan	paket					1			Dispar
			Strategi Sirkulasi Pengunjung											

No	Program Kerja	Uraian Program Kerja	Aktivitas	Lokasi	Indikator	Satuan	Indikasi Target					Keterangan	Perangkat Daerah/ Penanggungjawab	
							2024	2025	2026	2027	2028			2029
			Melaksanakan kajian srategi sirkulasi pengunjung Kawasan Panggung Krapyak	Kawasan Sumbu Filosofi	Tersedianya rekomendasi Strategi Sirkulasi Pengunjung di Kawasan Panggung Krapyak	doku men				1				Dispar
			Pelatihan dan Perencanaan Pariwisata Berkelanjutan											
			Pelatihan Peningkatan Inovasi dan Higienitas Sajian Kuliner	Kawasan Sumbu Filosofi	Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	orang	50							Dispar
				Kawasan Sumbu Filosofi	Meningkatnya Jumlah SDM Pariwisata yang Dikembangkan Kapasitasnya Berdasarkan pada SKKNI	orang	40							Dispar
			Pelatihan Pengelolaan Desa Wisata	Kawasan Sumbu Filosofi	Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	orang	46							Dispar

No	Program Kerja	Uraian Program Kerja	Aktivitas	Lokasi	Indikator	Satuan	Indikasi Target					Keterangan	Perangkat Daerah/ Penanggungjawab	
							2024	2025	2026	2027	2028			2029
				zona penyangga dan wider setting	Meningkatnya Jumlah SDM Pariwisata yang Dikembangkan Kapasitasnya Berdasarkan pada SKKNI	orang	40							Dispar
			Pelatihan Pemasaran Digital	zona penyangga dan wider setting	Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	orang	46				40			Dispar
				zona penyangga dan wider setting	Meningkatnya Jumlah SDM Pariwisata yang Dikembangkan Kapasitasnya Berdasarkan pada SKKNI	orang	40				40			Dispar
			Pelatihan Peningkatan Kelembagaan Pokdarwis/Desa Wisata	zona penyangga dan wider setting	Jumlah SDM pokdarwis/desa wisata yang ditingkatkan Kapasitasnya	orang		40	40					Dispar

No	Program Kerja	Uraian Program Kerja	Aktivitas	Lokasi	Indikator	Satuan	Indikasi Target					Keterangan	Perangkat Daerah/ Penanggungjawab	
							2024	2025	2026	2027	2028			2029
				zona penyangga dan wider setting	Jumlah SDM pokdarwis/desa wisata yang Dikembangkan Kapasitasnya Berdasarkan pada SKKNI	orang			40					Dispar
			Pelatihan Peningkatan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	zona penyangga dan wider setting	Jumlah SDM pelaku ekonomi kreatif yang ditingkatkan Kapasitasnya	orang		40						Dispar
				zona penyangga dan wider setting	Jumlah SDM Pemandu Wisata yang Dikembangkan Kapasitasnya Berdasarkan pada SKKNI	orang		40						Dispar
			Pelatihan Pemandu Wisata Budaya	zona penyangga dan wider setting	Jumlah SDM pemandu wisata budaya yang ditingkatkan Kapasitasnya	orang			40		40			Dispar

No	Program Kerja	Uraian Program Kerja	Aktivitas	Lokasi	Indikator	Satuan	Indikasi Target					Keterangan	Perangkat Daerah/ Penanggungjawab	
							2024	2025	2026	2027	2028			2029
				zona penyangga dan wider setting	Jumlah SDM Pemandu Wisata yang Dikembangkan Kapasitasnya Berdasarkan pada SKKNI	orang			40		40			Dispar
			Pelatihan Pemandu Wisata Outbound	zona penyangga dan wider setting	Jumlah SDM pemandu wisata Outbound yang ditingkatkan Kapasitasnya	orang	50			40				Dispar
				zona penyangga dan wider setting	Jumlah SDM Pemandu Wisata Outbound yang Dikembangkan Kapasitasnya Berdasarkan pada SKKNI	orang				40				Dispar
			Pelatihan Pengelolaan Usaha Homestay/Pondok Wisata	zona penyangga dan wider setting	Jumlah SDM Pengelola usaha homestay/pondok wisata yang ditingkatkan Kapasitasnya	orang	46			40				Dispar

No	Program Kerja	Uraian Program Kerja	Aktivitas	Lokasi	Indikator	Satuan	Indikasi Target					Keterangan	Perangkat Daerah/ Penanggungjawab	
							2024	2025	2026	2027	2028			2029
				zona penyangga dan wider setting	Jumlah SDM Pemandu Wisata Outbound yang Dikembangkan Kapasitasnya Berdasarkan pada SKKNI	orang				40				Dispar
			Pelatihan Tata Kelola Destinasi	zona penyangga dan wider setting	Jumlah SDM Pengelola destinasi wisata yang ditingkatkan Kapasitasnya	orang					40			Dispar
				zona penyangga dan wider setting	umlah SDM pengelola destinasi wisata yang Dikembangkan Kapasitasnya Berdasarkan pada SKKNI	orang					40			Dispar
			Pelatihan Kebersihan Lingkungan, Sanitasi dan Pengelolaan Sampah di Destinasi Pariwisata	zona penyangga dan wider setting	Jumlah SDM Pengelola kebersihan destinasi wisata yang ditingkatkan Kapasitasnya	orang	50				40			Dispar

No	Program Kerja	Uraian Program Kerja	Aktivitas	Lokasi	Indikator	Satuan	Indikasi Target					Keterangan	Perangkat Daerah/ Penanggungjawab	
							2024	2025	2026	2027	2028			2029
				zona penyangga dan wider setting	Jumlah SDM pengelola kebersihan destinasi wisata yang Dikembangkan Kapasitasnya Berdasarkan pada SKKNI	orang						40		Dispar
			Penyusunan Master Plan Sumbu Filosofi Wilayah Kabupaten Bantul	Kawasan Sumbu Filosofi	Tersusunnya Master Plan Sumbu Filosofi Wilayah Kabupaten Bantul	dokumen			1					Dispar
			Penyusunan DED pusat pengunjung kawasan Panggung Krapyak	Zona penyangga	Tersusunnya DED pusat pengunjung Kawasan Panggung Krapyak	dokumen				1				Dispar
			Pembangunan pusat pengunjung kawasan Panggung Krapyak	Zona penyangga	Terbangunnya pusat pengunjung kawasan Panggung Krapyak	unit					1			Dispar

No	Program Kerja	Uraian Program Kerja	Aktivitas	Lokasi	Indikator	Satuan	Indikasi Target						Keterangan	Perangkat Daerah/ Penanggungjawab
							2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		Pembangunan Fasilitas Toilet Umum di sepanjang property wilayah Bantul	Pembangunan Fasilitas Toilet Umum	Kawasan Sumbu Filosofi	Terbangunnya Fasilitas Toilet Umum	lokasi					4			Dispar
2.	Penyelesaian Tekanan Masyarakat Sekitar	Keterlibatan Masyarakat dan Pembangunan Berkelanjutan	Kajian Perencanaan Revitalisasi Kawasan Panggung Krpyak											
			Penyusunan perancangan dan perencanaan Daya Tarik Wisata unggulan di Kawasan Panggung Krpyak	zona inti, penyangga dan wider setting	Tersedianya Dokumen Perancangan dan Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	dokumen		1						Dispar
			Penyusunan dokumen Revitalisasi Kawasan Panggung Krpyak	zona inti, penyangga dan wider setting	Tersusunnya Rencana Revitalisasi Kawasan Panggung Krpyak	dokumen			1					Dispar

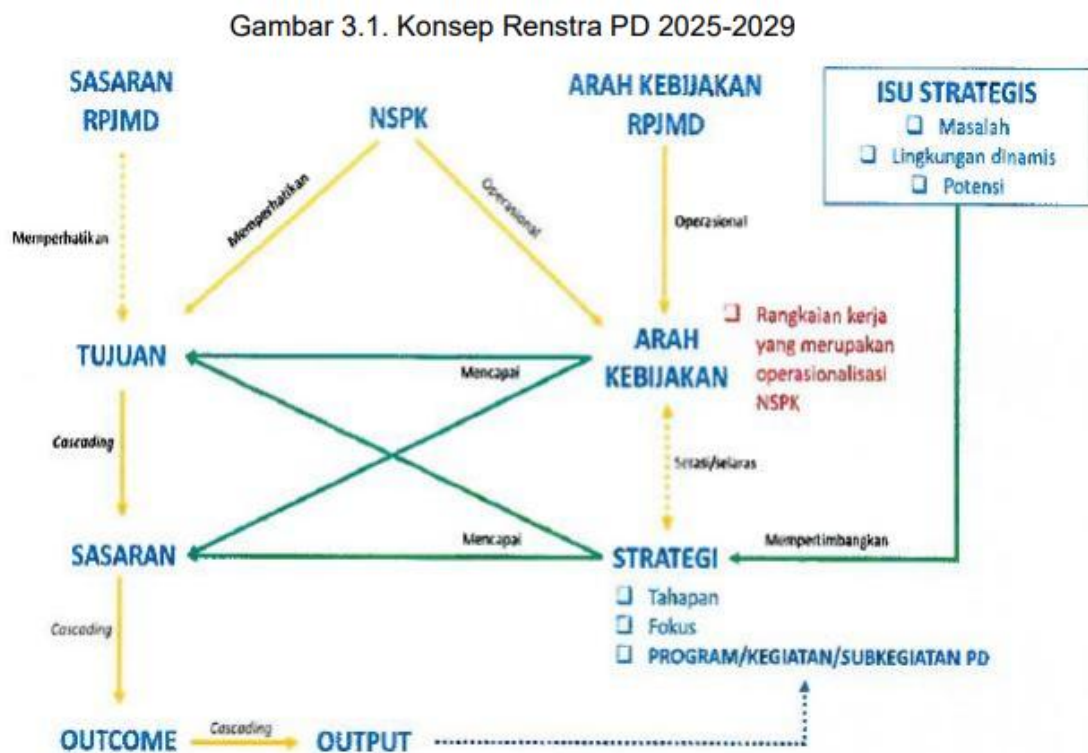
No	Program Kerja	Uraian Program Kerja	Aktivitas	Lokasi	Indikator	Satuan	Indikasi Target						Keterangan	Perangkat Daerah/ Penanggungjawab
							2024	2025	2026	2027	2028	2029		
			Revitalisasi Kawasan Panggung Krapayak	zona inti, penyangga dan wider setting	Terevitasilasinya Kawasan Panggung Krapyak	paket				1	1	1		Dispar

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1. Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu enam tahun. Sedangkan sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan berupa hasil pembangunan daerah/perangkat daerah yang diperoleh dari pencapaian *outcome* program perangkat daerah. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Selanjutnya, rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul disajikan pada tabel 3.1.



Sumber: Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 tahun 2025

Tabel 3. 1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul

Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD	Tujuan Perangkat Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	Indikator	Baseline Capaian 2024	Target Capaian						Ket
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Tujuan Daerah											
Meningkatnya ketangguhan perekonomian daerah			Gini Ratio	0,417	0,390-0,410	0,385-0,409	0,383 – 0,408	0,380 – 0,407	0,378 – 0,406	0,375 – 0,405	
Sasaran Daerah											
Meningkatnya produktivitas sektor unggulan daerah			Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum	12,75	12,77-12,86	12,83-13,19	12,96-13,66	13,18-14,12	13,41-14,58	13,63-15,05	
	Pengembangan pariwisata unggulan yang inklusif dan berkelanjutan		Persentase retribusi sektor pariwisata terhadap PAD	4,80	4,97	5,13	5,30	5,46	5,62	5,79	
		Meningkatnya kualitas destinasi wisata dan ekonomi kreatif berbasis potensi lokal	Peningkatan Kunjungan Wisatawan	2,86 persen	2,87 persen	2,88 persen	2,89 persen	2,90 persen	2,91 persen	2,92 persen	Jumlah kunjungan wisatawan = Jumlah wisatawan yang dikelola pemerintah Daerah + jumlah wisatawan yang dikelola selain Pemerintah Daerah.
			Tingkat Hunian Akomodasi	47,61 persen	47,69 persen	47,77 persen	47,85 persen	47,93 persen	48,01 persen	48,09 persen	Rata-rata lama menginap wisatawan

3.2 Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi merupakan rangkaian tahapan atau langkah-langkah yang berisikan *grand design* perencanaan pembangunan dalam upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan.

Tabel 3. 2 Pentahapan Renstra Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul Tahun 2026-2030

Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Meningkatkan daya tarik destinasi pariwisata melalui peningkatan kapasitas SDM pengelola daya tarik wisata	Meningkatkan jangkauan pemasaran pariwisata melalui kegiatan penguatan promosi pariwisata	Meningkatkan kualitas ekosistem ekonomi kreatif	Meningkatkan kapasitas SDM pariwisata dan ekonomi kreatif melalui pelatihan dan sertifikasi bagi SDM pariwisata dan ekonomi kreatif	Meningkatkan kualitas kelembagaan pokdarwis/desa wisata melalui penguatan dan pelatihan kelembagaan pokdarwis/desa wisata

Sedangkan arah kebijakan merupakan pedoman untuk menentukan tahapan pembangunan selama lima tahun guna mencapai sasaran RPJMD secara bertahap. Strategi atau langkah-langkah dalam upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan disusun menggunakan analisis SWOT berdasarkan sasaran yang hendak dicapai, antara lain :

Analisa Lingkungan Internal	<p>Kekuatan (<i>Strength</i>)</p> <ol style="list-style-type: none"> Kesiapan struktur organisasi, tata kerja, dan tupoksi Dinas Pariwisata yang cukup memadai. Perangkat Perencanaan dan Studi Obyek Wisata yang memadai. Keanekaragaman obyek wisata. Aksesibilitas ke Kabupaten Bantul mudah dari Yogyakarta Kebijakan Pemerintah Kabupaten Bantul yang mendukung kegiatan pembangunan pariwisata
-----------------------------	---

		<ul style="list-style-type: none"> f. Iklim investasi yang kondusif dan baik di sektor pariwisata g. Keterlibatan dan partisipasi masyarakat lokal dalam pengembangan pariwisata khususnya di pedesaan.
		<p>Kelemahan (<i>Weakness</i>)</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Kualitas dan kuantitas SDM Kepariwisata Kabupaten Bantul masih terbatas. b. Kondisi sarana dan prasarana serta fasilitas pendukung obyek wisata yang belum memadai dalam pelayanan bagi wisatawan. c. Pelayanan dan sikap masyarakat di obyek wisata yang belum mencerminkan Sapta Pesona. d. Kurangnya produk wisata yang atraktif, inovatif, dan edukatif. e. Kurang optimalnya koordinasi kebijakan antar instansi pemerintah dalam pengembangan pariwisata. f. Terbatasnya kapabilitas basis data dan sistem informasi pariwisata. g. Belum optimalnya promosi dan pemasaran pariwisata.
Analisa Eksternal	Lingkungan	<p>Peluang (<i>Opportunities</i>)</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Yogyakarta sebagai kota pendidikan, budaya, dan pariwisata, serta merupakan tempat tujuan wisata utama keenam di Indonesia. b. Daya dukung investasi kepariwisataan yang memadai. c. Kecenderungan tren perubahan minat kunjungan wisata kearah (berorientasi) pada minat khusus (wisata pedesaan, ekowisata, dan agrowisata) d. Dukungan <i>stakeholder</i> pariwisata khususnya propinsi dan nasional yang kuat dalam pengembangan pariwisata daerah. e. Keberpihakan kalangan akademisi dan perguruan tinggi yang memadai dalam pengembangan pariwisata daerah. f. Pergeseran kebijakan pembangunan nasional yang menempatkan sektor pariwisata sebagai salah satu sektor prioritas.
		<p>Tantangan (<i>Threats</i>)</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Tingkat persaingan antar daerah dalam penawaran produk wisata yang tinggi. b. Tingkat persepsi dan ekspektasi wisatawan terhadap kondisi dan kenyamanan di obyek wisata meningkat. c. Dengan dibukanya Jembatan Pandansimo, JJLS, dan Kelok 23 bisa menjadi peluang bagi wisatawan untuk berpindah ke obyek wisata selain Bantul untuk itu tetep menjaga kenyamanan agar wisatawan tidak hanya lewat, tapi juga betah di Bantul.

Berdasarkan kajian analisis lingkungan sebagaimana tersebut di atas, maka Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul merumuskan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan prioritas berdasarkan masing-masing misi pada Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul adalah sebagai berikut:

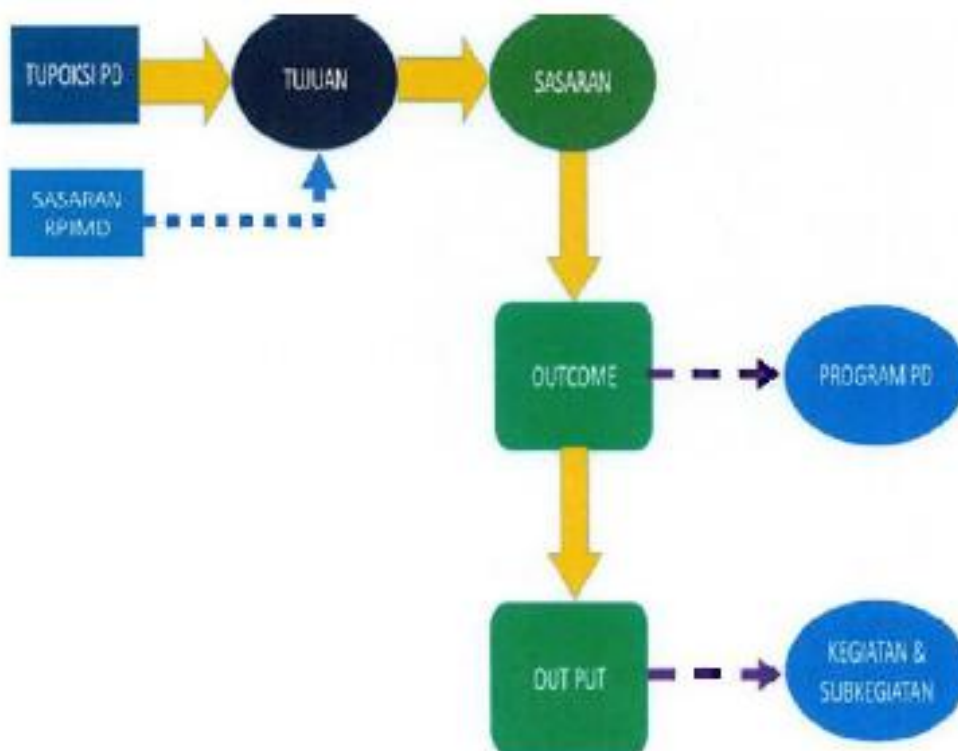
Tabel 3. 3 Rumusan Arah Kebijakan Renstra Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul

No	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra Dinas Pariwisata
(1)	(2)	(3)
	1. Meningkatnya daya tarik destinasi pariwisata	1. Peningkatan daya tarik destinasi pariwisata
	2. Meningkatnya jangkauan pemasaran pariwisata	2. Peningkatan media promosi melali media cetak, elektronik dan media lainnya baik dalam dan luar negeri
	3. Meningkatnya kualitas ekosistem kreatif	3. Pengembangan SDM Ekonomi Kreatif melalui peningkatan kapasitas pelaku ekonomi kreatif melalui pelatihan, <i>workshop</i> , dan sertifikasi (kuliner, kriya, musik, fashion, dll.)
	4. Meningkatnya kapasitas SDM pariwisata dan ekonomi kreatif	4. Pengembangan produk ekonomi kreatif lokal yang mendukung pariwisata

BAB IV
PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA
PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1 Program, Kegiatan, Subkegiatan

Tahap penyusunan program dan kegiatan perangkat daerah serta pendanaannya merupakan langkah teknokratis dalam menerjemahkan berbagai analisis dan metodologi perumusan sebelumnya ke dalam bentuk program/kegiatan.



Sumber: Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025

Gambar 4.1
Kerangka perumusan program, kegiatan dan subkegiatan Renstra
Perangkat Daerah

Tabel 4. 1 Rumusan Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan

NSPK dan Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD	Tujuan PD	Sasaran PD	Bidang Urusan/ Program/Kegiatan /Subkegiatan	Indikator	Capaian 2024	Baseline Tahun 2025	2026		2027		2028		2029		2030		Ket
						Target	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Meningkatnya produktivitas sektor unggulan daerah				Gini Ratio	0,417	0,390-0,410	0,385-0,409		0,383-0,408		0,380-0,407		0,378-0,406		0,375-0,405		
	Pengembangan pariwisata unggulan yang inklusif dan berkelanjutan			Persentase retribusi sektor pariwisata terhadap PAD	4,80 persen	4,97persen	5,13 persen		5,30 persen		5 persen		5,62 persen		5,79 persen		
		Meningkatnya kualitas destinasi wisata dan ekonomi kreatif berbasis potensi lokal		Peningkatan kunjungan wisatawan	2,86 persen	2,87 persen	2,88 persen		2,89 persen		2,90 persen		2,91 persen		2,92 persen		
				Tingkat hunian akomodasi	47,61 persen	47,69 persen	47,77 persen		47,85 persen		47,93 persen		48,01 persen		48,09 persen		
			BIDANG KEBUDAYAAN														
Meningkatnya produktivitas sektor unggulan daerah			2.22.08 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Jumlah pengunjung di daya tarik wisata budaya dan sejarah	2.483.628 orang	2.554.014 orang	2.626.420 orang	1.866.964.000	1.701.570 orang	500.000.000	1.749.844 orang	500.000.000	1.799.505 orang	500.000.000	1.850.593 orang	500.000.000	
Meningkatnya produktivitas sektor unggulan daerah			2.22.08.5.06 Kegiatan Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya	Meningkatnya kualitas pengembangan kearifan lokal dan potensi budaya	100 persen	100 persen	100 persen	1.866.964.000	100 persen	500.000.000	100 persen	500.000.000	100 persen	500.000.000	100 persen	500.000.000	
				Capaian Kinerja Pengembangan Kalurahan Wisata													
Meningkatnya produktivitas sektor unggulan daerah			2.22.08.5.06.0002 Subkegiatan Pengembangan Atraksi Wisata Budaya	Jumlah Objek Atraksi Wisata Budaya yang Dikembangkan	8 objek	2 objek	2.626.420	1.866.964.000	4 objek	500.000.000	4 objek	500.000.000	4 objek	500.000.000		500.000.000	
Meningkatnya produktivitas sektor			2.22.08.5.07 Kegiatan Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	Meningkatnya adat seni, tradisi dan lembaga budaya	n/a	n/a	1 lembaga	78.114.000	-	-	-	-	-	-	-	-	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD	Tujuan PD	Sasaran PD	Bidang Urusan/ Program/Kegiatan /Subkegiatan	Indikator	Capaian 2024	Baseline Tahun 2025	2026		2027		2028		2029		2030		Ket
						Target	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
						(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
unggulan daerah																	
				Capaian Kinerja Pengembangan Adat Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	n/a	n/a	1 lembaga	78.114.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Meningkatnya produktivitas sektor unggulan daerah			2.22.08.5.07.0014 Subkegiatan Peningkatan Lembaga Wisata Budaya	Jumlah Lembaga Wisata Budaya yang Ditingkatkan	n/a	n/a	1 lembaga	78.114.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Meningkatnya produktivitas sektor unggulan daerah			PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG		n/a	n/a	n/a	n/a	2 kawasan	100.000.000	2 kawasan	100.000.000	2 kawasan	100.000.000	2 kawasan	100.000.000	
				Jumlah kawasan ruang strategis yang dikembangkan dan dimanfaatkan	n/a	n/a	n/a	n/a	2 kawasan	100.000.000	2 kawasan	100.000.000	2 kawasan	100.000.000	2 kawasan	100.000.000	
Meningkatnya produktivitas sektor unggulan daerah			Kegiatan Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten	Meningkatnya kualitas pemanfaatan tata ruang satuan ruang strategis kasultanan dan kadipaten													
				Capaian Kinerja Pemanfaatan Tata Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten	n/a	n/a	n/a	n/a	2 kawasan	100.000.000	2 kawasan	100.000.000	2 kawasan	100.000.000	2 kawasan	100.000.000	
			Sub Kegiatan Pemanfaatan Ruang Satuan	Jumlah Dokumen Pemanfaatan	n/a	n/a	n/a	n/a	1 dokumen	100.000.000	1 dokumen	100.000.000	1 dokumen	100.000.000	1 dokumen	100.000.000	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD	Tujuan PD	Sasaran PD	Bidang Urusan/ Program/Kegiatan /Subkegiatan	Indikator	Capaian 2024	Baseline Tahun 2025	2026		2027		2028		2029		2030		Ket
						Target	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
			Ruang Strategis Pantai SamasParangtritis	Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Selatan													
			BIDANG PARIWISATA														
Meningkatnya produktivitas sektor unggulan daerah			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	84 angka	84,20 angka	84,40 angka	8.916.615.004	84,60angka	8.724.343.507	84,80 angka	9.025.019.709	85,00 angka	9.014.151.530	85,20 angka	9.078.074.695	
				Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	96,68 indeks	96,70 indeks	96,72 indeks		96,74 indeks		96,76 indeks		96,78 indeks		96,80 indeks		
Meningkatnya produktivitas sektor unggulan daerah			Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah	Meningkatnya kualitas perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah													
				Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah	100 persen	100 persen	100 persen	Rp. 13.500.000	100 persen	Rp. 13.500.000	100 persen	Rp. 13.500.000	100 persen	Rp. 17.500.000	100 persen	Rp. 17.500.000	
Meningkatnya produktivitas sektor unggulan daerah			Subkegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	8.500.000	3 dokumen	8.500.000	3 dokumen	8.500.000	3 dokumen	10.000.000	3 dokumen	10.000.000	
Meningkatnya produktivitas sektor unggulan daerah			Subkegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Ddarah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 laporan	4 laporan	4 laporan	5.000.000	4 laporan	5.000.000	4 laporan	5.000.000	4 laporan	7.500.000	4 laporan	7.500.000	
Meningkatnya produktivitas sektor unggulan daerah			Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Meningkatnya kualitas administrasi keuangan													

NSPK dan Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD	Tujuan PD	Sasaran PD	Bidang Urusan/ Program/Kegiatan /Subkegiatan	Indikator	Capaian 2024	Baseline Tahun 2025	2026		2027		2028		2029		2030		Ket
						Target	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
				Perangkat Daerah													
				Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan	100 persen		100 persen	6.674.632.176	100 persen	6.674.632.176	100 persen	6.674.632.176	100 persen	6.674.632.176	100 persen	6.674.632.176	
Meningkatnya produktivitas sektor unggulan daerah			Subkegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang Yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	55 orang/bulan	65 orang/bulan	55 orang/bulan	6.537.928.176	55 orang/bulan	6.537.928.176	55 orang/bulan	6.537.928.176	55 orang/bulan	6.537.928.176	55 orang/bulan	6.537.928.176	
Meningkatnya produktivitas sektor unggulan daerah			Subkegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	131.604.000	4 dokumen	131.604.000	4 dokumen	131.604.000	4 dokumen	131.604.000	4 dokumen	131.604.000	
Meningkatnya produktivitas sektor unggulan daerah			Subkegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuang	12 laporan	12 laporan	12 laporan	5.100.000	12 laporan	5.100.000	12 laporan	5.100.000	12 laporan	5.100.000	12 laporan	5.100.000	
Meningkatnya produktivitas sektor unggulan daerah			Kegiatan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Meningkatnya kualitas pendapatan daerah yang menjadi kewenangan Perangkat Daerah													
				Capaian Kinerja Pengelolaan Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	100 persen	100 persen	100 persen	338.325.000	100 persen	338.325.000	100 persen	338.325.000	100 persen	338.325.000	100 persen	338.325.000	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD	Tujuan PD	Sasaran PD	Bidang Urusan/ Program/Kegiatan /Subkegiatan	Indikator	Capaian 2024	Baseline Tahun 2025	2026		2027		2028		2029		2030		Ket
						Target	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Meningkatnya produktivitas sektor unggulan daerah			Subkegiatan Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	338.325.000	12 dokumen	338.325.000	12 dokumen	338.325.000	12 dokumen	338.325.000	12 dokumen	338.325.000	
Meningkatnya produktivitas sektor unggulan daerah			Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Meningkatnya kualitas administrasi kepegawaian Perangkat Daerah													
				Capaian Kinerja Pengelolaan Kepegawaian Perangkat Daerah	100 persen	100 persen	100 persen	5.100.000	100 persen	5.100.000	100 persen	5.100.000	100 persen	5.100.000	100 persen	5.100.000	
Meningkatnya produktivitas sektor unggulan daerah			Subkegiatan Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	5.100.000	12 dokumen	5.100.000	12 dokumen	5.100.000	12 dokumen	5.100.000	12 dokumen	5.100.000	
Meningkatnya produktivitas sektor unggulan daerah			Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Meningkatnya kualitas administrasi umum Perangkat Daerah													
				Capaian Kinerja Administrasi Umum	100 persen	100 persen	100 persen	681.768.300	100 persen	595.768.300	100 persen	681.768.300	100 persen	681.768.300	100 persen	681.768.300	
Meningkatnya produktivitas sektor unggulan daerah			Subkegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Yang Disediakan	100 persen	100 persen	12 paket	37.190.000	12 paket	37.190.000	12 paket	37.190.000	12 paket	37.190.000	12 paket	37.190.000	
Meningkatnya produktivitas sektor unggulan daerah			Subkegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 paket	12 paket	12 paket	208.814.500	12 paket	208.814.500	12 paket	208.814.500	12 paket	208.814.500	12 paket	208.814.500	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD	Tujuan PD	Sasaran PD	Bidang Urusan/ Program/Kegiatan /Subkegiatan	Indikator	Capaian 2024	Baseline Tahun 2025	2026		2027		2028		2029		2030		Ket
						Target	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Meningkatnya produktivitas sektor unggulan daerah			Subkegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 paket	12 paket	12 paket	30.532.300	12 paket	30.532.300	12 paket	30.532.300	12 paket	30.532.300	12 paket	30.532.300	
Meningkatnya produktivitas sektor unggulan daerah			Subkegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 paket	12 paket	12 paket	86.605.500	12 paket	86.605.500	12 paket	86.605.500	12 paket	86.605.500	12 paket	86.605.500	
Meningkatnya produktivitas sektor unggulan daerah			Subkegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 laporan	12 laporan	12 laporan	21.000.000	12 laporan	21.000.000	12 laporan	21.000.000	12 laporan	21.000.000	12 laporan	21.000.000	
Meningkatnya produktivitas sektor unggulan daerah			Subkegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	12 laporan	12 laporan	286.526.000	12 laporan	200.526.000	12 laporan	286.526.000	12 laporan	286.526.000	12 laporan	286.526.000	
Meningkatnya produktivitas sektor unggulan daerah			Subkegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	6.000.000	12 dokumen	6.000.000	12 dokumen	6.000.000	12 dokumen	6.000.000	12 dokumen	6.000.000	
Meningkatnya produktivitas sektor unggulan daerah			Subkegiatan Dukungan Palaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	5.100.000	1 dokumen	5.100.000	1 dokumen	5.100.000	1 dokumen	5.100.000	1 dokumen	5.100.000	
Meningkatnya produktivitas sektor unggulan daerah			Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Meningkatan ya kualitas pengadaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah													

NSPK dan Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD	Tujuan PD	Sasaran PD	Bidang Urusan/ Program/Kegiatan /Subkegiatan	Indikator	Capaian 2024	Baseline Tahun 2025	2026		2027		2028		2029		2030		Ket
						Target	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
				Capaian Kinerja Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen	100 persen	100 persen	70.000.000	100 persen	70.000.000	100 persen	70.000.000	100 persen	70.000.000	100 persen	70.000.000	
Meningkatnya produktivitas sektor unggulan daerah			Subkegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	n/a	n/a	2 unit	70.000.000	2 unit	70.000.000	2 unit	70.000.000	2 unit	70.000.000	2 unit	70.000.000	
Meningkatnya produktivitas sektor unggulan daerah			Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya kualitas penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan Daerah													
				Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Urusan Pemerintahan Dearah	100 persen	100 persen	100 persen	669.780.000	100 persen	619.780.000	100 persen	669.780.000	100 persen	669.780.000	100 persen	669.780.000	
Meningkatnya produktivitas sektor unggulan daerah			Subkegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	138.000.000	12 laporan	138.000.000	12 laporan	138.000.000	12 laporan	138.000.000	12 laporan	138.000.000	
Meningkatnya produktivitas sektor unggulan daerah			Subkegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Yang Disediakan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	200.780.000	12 laporan	150.780.000	12 laporan	200.780.000	12 laporan	200.780.000	12 laporan	200.780.000	
Meningkatnya produktivitas sektor unggulan daerah			Subkegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	331.000.000	12 laporan	331.000.000	12 laporan	331.000.000	12 laporan	331.000.000	12 laporan	331.000.000	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD	Tujuan PD	Sasaran PD	Bidang Urusan/ Program/Kegiatan /Subkegiatan	Indikator	Capaian 2024	Baseline Tahun 2025	2026		2027		2028		2029		2030		Ket
						Target	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Meningkatnya produktivitas sektor unggulan daerah			Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatny a kualitas pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintaha n Daerah													
				Capaian Kinerja Pemeliharaa n Barang Milik Daerah	100 persen	100 persen	100 persen	463.509.528	100 persen	407.238.031	100 persen	571.914.233	100 persen	557.046.054	100 persen	620.969.219	
Meningkatnya produktivitas sektor unggulan daerah			Subkegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas dan Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 unit	1 unit	1 unit	54.185.800	1 unit	54.185.800	1 unit	54.185.800	1 unit	54.185.800	1 unit	54.185.800	
Meningkatnya produktivitas sektor unggulan daerah			Subkegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	27 unit	27 unit	27 unit	384.323.728	27 unit	328.052.231	27 unit	492.728.433	27 unit	477.860.254	27 unit	541.783.419	
Meningkatnya produktivitas sektor unggulan daerah			Subkegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Yang Dipelihara/D irehabilitasi	3 unit	3 unit	3 unit	25.000.000	3 unit	25.000.000	3 unit	25.000.000	3 unit	25.000.000	3 unit	25.000.000	
Meningkatnya produktivitas sektor unggulan daerah			3.26.02 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA														
				Jumlah kunjungan wisatawan	5.937.365 orang	6.107.767 orang	6.527.877 orang	4.282.094.981	6.714.378 orang	4.745.645.646	6.906.207 orang	4.334.155.011	7.103.586 orang	4.328.935.701	7.306.606 orang	4.359.634.017	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD	Tujuan PD	Sasaran PD	Bidang Urusan/ Program/Kegiatan /Subkegiatan	Indikator	Capaian 2024	Baseline Tahun 2025	2026		2027		2028		2029		2030		Ket
						Target	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Meningkatnya produktivitas sektor unggulan daerah			3.26.02.2.02 Kegiatan Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Meningkatnya Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/ Kota													
				Peningkatan Daya Tarik Destinasi Wisata	23,08 persen	37,50 persen	28,57 persen	2.218.886.088	22,22 persen	2.440.774.675	23,08 persen	1.984.852.142	40,91 persen	2.053.337.357	100 persen	2.248.671.092	
Meningkatnya produktivitas sektor unggulan daerah			3.26.02.2.01.0007 Subkegiatan Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan hasil pelaksanaan Monitoring dan evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	12 laporan	12 laporan	12 laporan	1.429.888.588	12 laporan	1.572.877.425	12 laporan	1.030.165.167	12 laporan	1.003.181.684	12 laporan	1.093.499.852	
Meningkatnya produktivitas sektor unggulan daerah			3.26.02.2.01.0008 Subkegiatan Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Pengelola Daya Tarik Wisata Unggulan yang Dikembangkan	16 orang	30 orang	30 orang	788.997.500	30 orang	867.897.250	30 orang	954.686.975	30 orang	1.050.155.673	30 orang	1.155.171.240	
Meningkatnya produktivitas sektor unggulan daerah			3.26.02.2.02 Kegiatan Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota													
				Peningkatan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kawasan Strategis Pariwisata	17,24 persen	14,71 persen	4,35 persen	328.016.936	20,83 persen	350.818.630	17,24 persen	475.900.493	14,71 persen	513.490.542	100 persen	554.839.596	
Meningkatnya produktivitas sektor			3.26.02.2.02.0002 Subkegiatan Perencanaan Kawasan Strategis	Tersedianya Dokumen Perencanaan Kawasan	4 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100.000.000	1 dokumen	100.000.000	1 dokumen	100.000.000	1 dokumen	100.000.000	1 dokumen	100.000.000	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD	Tujuan PD	Sasaran PD	Bidang Urusan/ Program/Kegiatan /Subkegiatan	Indikator	Capaian 2024	Baseline Tahun 2025	2026		2027		2028		2029		2030		Ket
						Target	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
						(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
unggulan daerah			Pariwisata Kabupaten/Kota	Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota													
Meningkatnya produktivitas sektor unggulan daerah			3.26.02.2.02.0004 Subkegiatan Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia dan Terpelihara dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	14 unit	2 unit	2 unit	228.016.936	2 unit	250.818.630	3 unit	375.900.493	3 unit	413.490.542	3 unit	454.839.596	
Meningkatnya produktivitas sektor unggulan daerah			3.26.02.2.03 Kegiatan Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota													
				Peningkatan pengelolaan Destinasi Pariwisata	100 persen	100 persen	100 persen	946.313.465	18,18 persen	1.154.568.359	15,38 persen	1.062.252.355	33,33, persen	938.125.138	100 persen	718.024.757	
Meningkatnya produktivitas sektor unggulan daerah			3.26.02.2.03.0004 Subkegiatan Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara	4 unit	2 unit	24 unit	946.313.465	24 unit	1.154.568.359	24 unit	1.062.252.355	24 unit	938.125.138	24 unit	718.024.757	
Meningkatnya produktivitas sektor unggulan daerah			3.26.02.2.04 Kegiatan Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Penertiban Surat Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota													
				Peningkatan Jumlah Ijin	6,45 persen	6,06 persen	7,42 persen	788.878.492	6,90 persen	799.483.982	6,45 persen	811.150.021	5,71 persen	823.982.664	100 persen	838.098.572	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD	Tujuan PD	Sasaran PD	Bidang Urusan/ Program/Kegiatan /Subkegiatan	Indikator	Capaian 2024	Baseline Tahun 2025	2026		2027		2028		2029		2030		Ket
						Target	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
						(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
				Usaha Pariwisata													
Meningkatnya produktivitas sektor unggulan daerah			3.26.02.2.04.0006 Subkegiatan Pengawasan dan Pembinaan Kepatuhan Pelaku Usaha yang telah tersertifikasi CHSE (berdasarkan Permenpar No 13 tahun 2020 dan SNI 9042:2021) dalam melaksanakan Standar CHSE di Kab./Kota	Jumlah usaha pariwisata yang telah terseftifikasi CHSE yang dibina dan diawasi	60 usaha	250 usaha	260 usaha	39.535.000	260 usaha	43.488.500	260 usaha	47.837.350	260 usaha	52.621.085	260 usaha	57.883.194	
Meningkatnya produktivitas sektor unggulan daerah			3.26.02.2.04.0008 Subkegiatan Fasilitasi Sertifikasi SNI 9042:2021 (SNI CHSE) di Kabupaten Kota	Jumlah usaha pariwisata dan ekonomi kreatif yang difasilitasi sertifikasi SNI 9042:2021	50 usaha	50 usaha	50 usaha	39.535.000	50 usaha	43.488.500	50 usaha	47.837.350	50 usaha	52.621.085	50 usaha	57.883.194	
Meningkatnya produktivitas sektor unggulan daerah			3.26.02.2.04.0012 Pengelolaan Investasi Pariwisata Kab/Kota	Jumlah Laporan Pengelolaan Investasi Pariwisata Kab/Kota	12 laporan	12 laporan	12 laporan	682.823.592	12 laporan	682.823.592	12 laporan	682.823.592	12 laporan	682.823.592	12 laporan	682.823.592	
Meningkatnya produktivitas sektor unggulan daerah			3.26.03 PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA														
				Persentase peningkatan media pemasaran pariwisata	2 persen	2 persen	2,4 persen	438.358.722	2,6 persen	428.906.268	2,8 persen	443.688.115	3 persen	443.153.814	3,2 persen	446.296.405	
Meningkatnya produktivitas sektor unggulan daerah			3.26.03.2.01 Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis	Meningkatnya pemasaran pariwisata dalam dan luar negeri pariwisata Kabupaten/Kota													

NSPK dan Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD	Tujuan PD	Sasaran PD	Bidang Urusan/ Program/Kegiatan /Subkegiatan	Indikator	Capaian 2024	Baseline Tahun 2025	2026		2027		2028		2029		2030		Ket
						Target	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
						(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
			Pariwisata Kabupaten/Kota														
				Persentase peningkatan media pemasaran pariwisata	2 persen	2 persen	2,4 persen	438.358.722	2,6 persen	428.906.268	2,8 persen	443.688.115	3 persen	443.153.814	3,2 persen	446.296.405	
Meningkatnya produktivitas sektor unggulan daerah			3.26.03.2.01.0003 Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota , Baik Dalam dan Luar Negeri	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	50.000.000	2 dokumen	50.000.000	2 dokumen	50.000.000	2 dokumen	50.000.000	2 dokumen	50.000.000	
Meningkatnya produktivitas sektor unggulan daerah			3.26.03.2.01.0004 Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	9 dokumen	8 dokumen	9 dokumen	85.900.000	9 dokumen	85.900.000	9 dokumen	85.900.000	9 dokumen	85.900.000	9 dokumen	85.900.000	
Meningkatnya produktivitas sektor unggulan daerah			3.26.03.2.01.0006 Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	12 laporan	12 laporan	12 laporan	167.480.969	12 laporan	167.480.969	12 laporan	167.480.969	12 laporan	167.480.969	12 laporan	167.480.969	
Meningkatnya produktivitas sektor unggulan daerah			3.26.03.2.01.0007 Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	8 promosi	8 promosi	56 promosi	134.978.026	56 promosi	125.525.572	56 promosi	140.307.419	56 promosi	139.773.118	56 promosi	142.915.709	
Meningkatnya produktivitas sektor unggulan daerah			3.26.04 PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN														

NSPK dan Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD	Tujuan PD	Sasaran PD	Bidang Urusan/ Program/Kegiatan /Subkegiatan	Indikator	Capaian 2024	Baseline Tahun 2025	2026		2027		2028		2029		2030		Ket
						Target	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
			DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL														
				Persentase pelaku ekonomi kreatif yang memiliki kekayaan intelektual	35 persen	36 persen	38 persen	150.034.685	39 persen	146.799.445	41 persen	151.858.748	43 persen	151.675.876	45 persen	152.751.473	
Meningkatnya produktivitas sektor unggulan daerah			33.26.04.2.02 Kegiatan Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Meningkatnya Kapasitas SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif													
				Cakupan Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kelayakan Intelektual	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	150.034.685	1 dokumen	146.799.445	1 dokumen	151.858.748	1 dokumen	151.675.876	1 dokumen	152.751.473	
Meningkatnya produktivitas sektor unggulan daerah			3.26.04.2.02.0009 Subkegiatan Penyusunan Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif	Jumlah Dokumen Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100.000.000	1 dokumen	100.000.000	1 dokumen	100.000.000	1 dokumen	100.000.000	1 dokumen	100.000.000	
Meningkatnya produktivitas sektor unggulan daerah			3.26.04.2.02.0020 Subkegiatan Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	12 laporan	12 laporan	12 laporan	50.034.685	12 laporan	46.799.445	12 laporan	51.858.748	12 laporan	51.675.876	12 laporan	52.751.473	
Meningkatnya produktivitas sektor unggulan daerah			3.26.05 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF														
				Persentase SDM pariwisata dan ekonomi kreatif yang aktif dan tervalidasi	6,13 persen	6,90 persen	7,70 persen	766.554.970	8,50 persen	750.025.528	9,30 persen	775.874.445	10,10 persen	774.940.115	10,90 persen	780.435.544	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD	Tujuan PD	Sasaran PD	Bidang Urusan/ Program/Kegiatan /Subkegiatan	Indikator	Capaian 2024	Baseline Tahun 2025	2026		2027		2028		2029		2030		Ket
						Target	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Meningkatnya produktivitas sektor unggulan daerah			3.26.05.2.01 Kegiatan Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Meningkatnya Kualitas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	100 persen	100 persen	100 persen	766.554.970	100 persen	750.025.528	100 persen	775.874.445	100 persen	774.940.115	100 persen	780.435.544	
				Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar													
Meningkatnya produktivitas sektor unggulan daerah			3.26.05.2.01.0005 Subkegiatan Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif	1 laporan	1 laporan	1 laporan	100.000.000	1 laporan	100.000.000	1 laporan	100.000.000	1 laporan	100.000.000	1 laporan	100.000.000	
Meningkatnya produktivitas sektor unggulan daerah			3.26.05.2.01.0006 Subkegiatan Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	240 orang	80 orang	100 orang	266.554.970	100 orang	250.025.528	100 orang	255.000.000	100 orang	254.000.000	100 orang	260.000.000	
Meningkatnya produktivitas sektor unggulan daerah			3.26.05.2.01.0009 Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata	Jumlah Masyarakat yang memperoleh Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk pengembangan Pariwisata	495 orang	120 orang	320 orang	400.000.000	320 orang	400.000.000	320 orang	400.000.000	320 orang	400.000.000	320 orang	400.000.000	

Dinas Pariwisata setiap tahun melakukan Analisa gender untuk menyusun Perencanaan Responsif Gender yang diharapkan dapat terjadi sinergi dan terintegrasi dengan dokumen perencanaan pembangunan lainnya. Dalam melakukan analisis gender Dinas Pariwisata menggunakan metode alur kerja *Gender Analysis Pathway (GAP)*. Hasil analisis gender tersebut dituangkan dalam penyusunan *Gender Budget Statement (GBS)* yaitu dokumen yang menginformasikan suatu output kegiatan telah responsif gender terhadap isu gender yang ada, dan atau suatu anggaran telah dialokasikan pada output kegiatan untuk menangani permasalahan kesenjangan gender. Hasil analisis gender yang terdapat dalam GAP dan GBS menjadi dasar Dinas Pariwisata dalam menyusun kerangka acuan kegiatan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan dokumen RKA/DPA Perangkat Daerah.

Setiap Badan Publik termasuk Dinas Pariwisata mempunyai kewajiban dalam menyediakan dan melayani permohonan informasi publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan dan cara sederhana sesuai Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Penyelenggaraan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagai upaya meningkatkan *public trust* dan partisipasi publik masyarakat Bantul dalam pembangunan melalui terimplementasikannya keterbukaan dan pelayanan informasi publik pada penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Bantul.

Proses monitoring dan evaluasi (monev) layanan informasi publik Tahun 2024 mengacu pada Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik. Aspek yang dinilai dalam proses monitoring dan evaluasi tersebut terdiri atas 6 (enam) komponen indikator yaitu: sarana prasarana; kualitas Informasi; jenis informasi; komitmen organisasi; inovasi dan strategi; dan digitalisasi. Adapun pelaksanaan monitoring dan evaluasi Badan Publik di Pemerintah Kabupaten Bantul dilaksanakan oleh Komisi Informasi Daerah DIY.

Tabel 4. 2
Daftar Subkegiatan Prioritas Dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
<i>(01)</i>	<i>(02)</i>	<i>(03)</i>	<i>(04)</i>	<i>(05)</i>
3.26.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pariwisata				
1.	2.22.08 - PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Meningkatnya pengunjung di daya tarik wisata budaya dan sejarah	2.22.08.5.06 - Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya	
			2.22.08.5.06.0002 - Pengembangan Atraksi Wisata Budaya	
2.	3.26.02 - PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Meningkatnya daya tarik destinasi pariwisata	3.26.02.2.02 - Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	
			3.26.02.2.02.0002 - Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	
			3.26.02.2.02.0004 - Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	
			3.26.02.2.03 - Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	
			3.26.02.2.03.0004 - Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	
3.	3.26.05 - PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Meningkatnya kapasitas SDM pariwisata dan ekonomi kreatif	3.26.05.2.01 - Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	
			3.26.05.2.01.0006 - Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	
			3.26.05.2.01.0009 - Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata	

4.2 Kinerja Penyelenggaraan Urusan

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja perangkat daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai perangkat daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2025-2029. Indikator kinerja perangkat daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2025-2029 disajikan dengan tabel berikut:

Tabel 4. 3 Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul

No	Indikator	Satuan	Target						Ket.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	Persentase retribusi sektor pariwisata terhadap PAD	persen	4,97	5,13	5,30	5,46	5,62	5,79	
2.	Peningkatan Kunjungan Wisatawan	persen	2,87	2,88	2,89	2,90	2,91	2,92	
3.	Tingkat Hunian Akomodasi	persen	47,69	47,77	47,85	47,93	48,01	48,01	

Tabel 4. 4 Indikator Kinerja Kunci (IKK) Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul

No	Indikator	Satuan	Target						Ket.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	Jumlah kunjungan wisatawan.	Orang	6.107.767	6.527.877	6.714.378	6.906.207	7.103586	7.306.606	
2.	Persentase peningkatan media pemasaran pariwisata.	Persentase	2,2	2,4	2,6	2,8	3,0	3,2	
3.	Persentase pelaku ekonomi kreatif yang memiliki kekayaan intelektual	Persentase	36	38	39	41	43	45	
4.	Persentase SDM pariwisata dan ekonomi kreatif yang aktif dan tervalidasi.	%	6,90	7,70	8,50	9,30	10,10	10,90	

BAB V

PENUTUP

Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJMD Tahun 2025-2029. Perencanaan Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 diarahkan untuk mendukung visi pembangunan daerah **“Terwujudnya Kabupaten Bantul yang Maju, Kuat, Demokratis dan Sejahtera dalam Bingkai Keberagaman dan Budaya Istimewa”**.

Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 akan digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026, 2027, 2028, 2029 dan 2030. Penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2030 akan dilakukan bersamaan dengan penyusunan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2030-2034 sesuai dengan jadwal yang ditetapkan peraturan perundang-undangan. Penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2030 akan memedomani perencanaan yang termuat dalam Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, serta mengacu pada RKPD Tahun 2030 yang disusun dengan berpedoman pada RPJMD Tahun 2025-2029 dan berdasarkan arah kebijakan RPJPD Kabupaten Bantul 2025-2045 sesuai periode/tahapan kedua (2030-2034).

Pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 diharapkan dapat didukung oleh seluruh pemangku kepentingan. Sinergi yang baik antara perangkat daerah, kelompok masyarakat dan dunia usaha diharapkan dapat mewujudkan visi pembangunan daerah.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 19 September 2025
BUPATI BANTUL,
ABDUL HALIM MUSLIH

